

LAPORAN PP 39

TRIWULAN III TA. 2025

BALAI STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI
SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Triwulan III tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Balai dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan disektor industri. Di samping itu juga dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin turut serta dalam menunjang pembangunan dan pengembangan industri terutama di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Triwulan III tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 39 tahun 2006. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Triwulan III tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pimpinan Kementerian Perindustrian khususnya Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dalam menilai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh BSPJI Samarinda dan sekaligus dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan dalam upaya optimalisasi pencapaian program kerja dan kinerja pada tahun yang akan datang.

Diharapkan Laporan Triwulan III BSPJI Samarinda Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 7 Oktober 2025

Kepala BSPJI Samarinda,



Fathullah
Fathullah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN	22
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	38
BAB IV PENUTUP.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, yang berlaku sejak tanggal 21 Februari 2022. Peraturan Menteri tersebut diterbitkan menyusul adanya Permenperin nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang memuat perubahan tugas Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menjadi menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BSPJI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen produk, teknologi dan industri hijau
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan kearsipan dan rumah tangga
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

1. 2. Latar Belakang Kegiatan/ Program

Visi

Menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan lingkungan stratejik yang semakin cepat menyebabkan pola pembangunan nasional dan daerah yang mengacu pada format jangka panjang (*longterm planning*) menjadi kurang sesuai dan tidak mampu lagi memberikan hasil yang optimal sebagai akibat dinamika lingkungan stratejik.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan perkembangan teknologi informasi yang cepat, maka Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSKJI) dituntut untuk meningkatkan perannya sebagai pendukung pembangunan industri di daerah melalui perencanaan yang berorientasi pada hasil.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memuat “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman”; secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia

dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Adapun Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dapat dilihat pada gambar berikut:



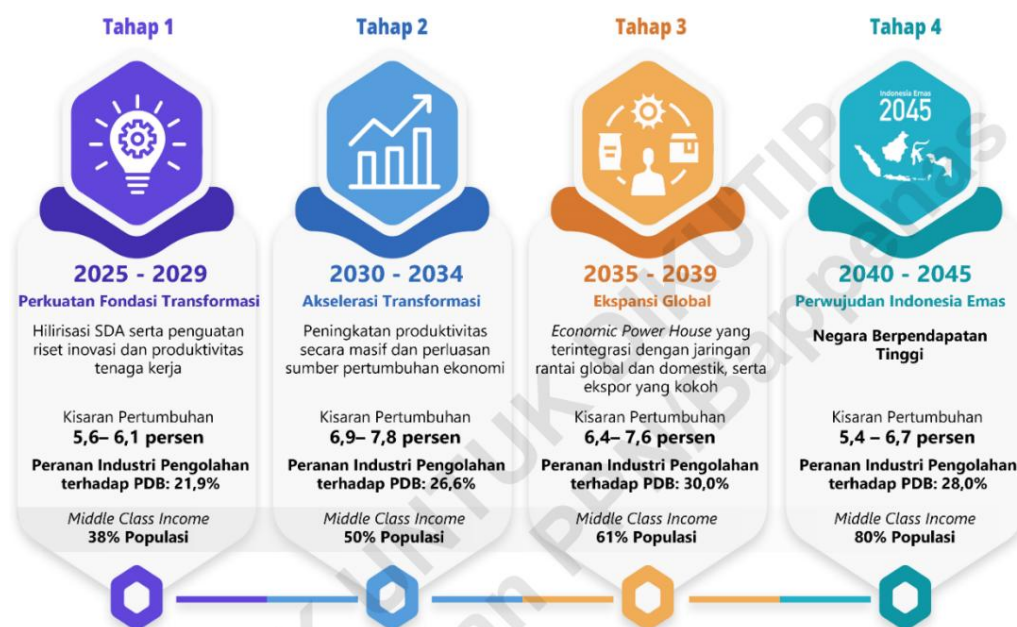
Gambar 1. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia bermitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010 dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Maka dari itu, industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor) menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2. Tahapan Transformasi Ekonomi

Untuk itu, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB emncapai 21,9%. Selain strategi industrialisasi untuk industri

prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau. Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai *net export* positif.

Sejalan dengan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif superprioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (2) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

Baik Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 maupun Rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses reviu untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Usulan visi Kementerian Perindustrian: “Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Industri Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan” dengan pemaknaan:

- Mandiri: Keberlangsungan industri dalam negeri tidak bergantung pada sumber daya luar negeri dan sektor industri menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional.
- Maju: Sektor industri berdaya saing, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri yang kuat dan berkeadilan.
- Berkelanjutan: Pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta bertujuan untuk menjangkau dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.

Visi Kementerian Perindustrian seyogianya selaras dengan/mengadopsi visi tersebut di atas. Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, diusulkan visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029:

Visi BSKJI:

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.”

Dalam rangka mendukung visi BSKJI, BSPJI Samarinda sebagai unit pelaksana teknis dengan wilayah kerja Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ke depan akan memiliki fokus dalam mewujudkan industri yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan kompetensi regional.

Misi

Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BKSJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standarisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

- Standardisasi industri secara mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri
- Pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri
- Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional
- Penguatan industri hijau secara bertahap
- Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing
- Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standarisasi industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH

dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Dalam mendukung misi BSKJI, BSPJI Samarinda sepenuhnya akan melaksanakan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing dan melaksanakan tata kelola yang baik/ *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel. BSPJI Samarinda akan sepenuhnya memperhatikan tiga aspek yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi yang diimplementasikan pada perumusan tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan

Tujuan BSPJI samarinda merujuk kepada tujuan BSKJI yaitu:

- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan *good governance*

Sasaran Kegiatan

Penentuan sasaran strategis perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSPJI Samarinda. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BSPJI Samarinda sesuai dengan sasaran strategis BSKJI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Acuan SS Kemenperin	Tujuan BSKJI	Acuan SP BSKJI		Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda	
SS1	T3	SP4	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri
				SK1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
				SK2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
SP1	T3	SP6	Terwujudnya SDM yang profesional	SK3	Terwujudnya SDM yang profesional
SP1	T3	SP7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik	SK4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
SP1	T4	SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
SP1	T4	SP9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi
SS5	T3	SP5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	SK7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan BSPJI Samarinda yang ditentukan berdasarkan Sasaran Program dan Tujuan BSKJI serta Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian. Penyusunan sasaran kegiatan pada kerangka perspektif BSPJI Samarinda ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3. Peta Strategis BSPJI Samarinda (2025 – 2029)

Sasaran kegiatan pada perspektif stakeholders merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi harapan pada pemangku kepentingan, yaitu :

1. TJ, Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri, sasaran ini memiliki indikator yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama antara lain :
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3,66 dan meningkat hingga 3,68 pada tahun 2029.
 - 2) Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 210 perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi dan meningkat menjadi 255 industri/ pelaku usaha/ instansi pada tahun 2029.

2. SK 1, Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 86% dan meningkat menjadi 88% di tahun 2029.
 - 2) Nilai *Net Promoter Score* (NPS), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 6 dan meningkat menjadi 10 di tahun 2029.
3. SK 2, Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 9,22% dan meningkat menjadi 43,49% pada tahun 2029.
 - 2) Jumlah hasil layanan jasa industri, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 4.545 dan meningkat menjadi 4.919 pada tahun 2029.
 - 3) Nilai Revenue on Aset (RoA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 8,10% dan meningkat menjadi 8,50% pada tahun 2029.
 - 4) Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 41,50% dan meningkat menjadi 43,50% pada tahun 2029.

Sasaran kegiatan pada perspektif *internal process* merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi aspirasi pada penyelenggaraan proses internal BSPJI Samarinda, yaitu :

1. SK5, Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, sasaran ini memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan tercapai 50,00% dan tetap 50,00% hingga tahun 2029.
 - 2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 94,98 dan meningkat menjadi 95,15 di tahun 2029.
2. SK7, Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 80,00% dan menjadi 82,00% pada tahun 2029.

Sasaran kegiatan pada perspektif *learn & growth* merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSPJI Samarinda, yaitu :

3. SK 3, Terwujudnya SDM yang profesional, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Indeks Profesionalitas ASN (IPASN), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh indeks 82,96 dan meningkat menjadi 84,50 pada tahun 2029.
4. SK 4, Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 20% dan meningkat hingga 100% di tahun 2029
 - 2) Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 80,00% dan meningkat menjadi 82,00% di tahun 2029.
 - 3) Indeks Pelayanan Publik (IPP), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 4,51 dan meningkat menjadi 4,53 pada tahun 2029.
5. SK6, Terwujudnya akuntabilitas organisasi, sasaran ini memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 80,45 dan meningkat hingga mencapai nilai 80,65 di tahun 2029.
 - 2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 94,18 dan meningkat menjadi 94,40 di tahun 2029.

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaanya terhadap tujuan BSKJI ditunjukkan pada tabel berikut:

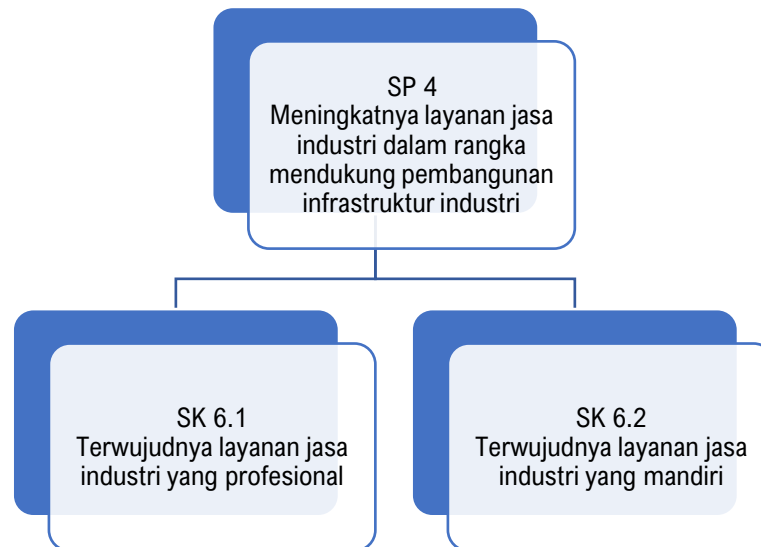
Tabel 2. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Tujuan	TJ/SK/IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
T3	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri							
T3	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,71	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68
T3	TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	200	210	221	232	243	255
T3	SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional							
T3	IKK.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	85,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00
T3	IKK.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	5	6	7	8	9	10
T3	SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri							
T3	IKK.2.1	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	7.187.636.112	9,22	18,19	26,21	34,63	43,49

Tujuan	TJ/SK/IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
T3	IKK.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	4.500	4.545	4.590	4.682	4.776	4.919
T3	IKK.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50
T3	IKK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50
T3	SK.3	Terwujudnya SDM Profesional							
T3	IKK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,96	82,96	83,00	83,50	84,00	84,50
T3	SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik							
T3	IKK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
T3	IKK.4.2	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	0,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
T3	IKK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,76	4,51	4,51	4,52	4,53	4,53
T4	SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien							
T4	IKK.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	100	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
T4	IKK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	94,98	94,98	95,00	95,05	95,10	95,15
T4	SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi							
T4	IKK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,45	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65
T4	IKK.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,18	94,18	94,25	94,30	94,35	94,40
T3	SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri							
T3	IKK.7.1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	65,24	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

BSPJI Samarinda melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Perindustrian dan BSKJI yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No.3/2014 tentang Perindustrian, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Dalam perumusannya, arah kebijakan ini diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri”. Upaya untuk mencapai cita-cita SP 4 tersebut didukung dengan dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu : SK 6.1 terwujudnya layanan jasa industri yang profesional serta SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri.



Gambar 4. Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kondisi meningkatnya layanan jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi fondasi penting bagi pengembangan layanan jasa industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standardisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular. Setiap unsur yang menopang arah kebijakan dan strategi BSKJI 2025-2029 dijabarkan pada sub-bab berikut yang turut sejalan dengan rumusan Sasaran Program. Penjabaran setiap strategi tersebut dibahas pada sub-bab berikut:

Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandardisasi

Ekosistem perdagangan global yang semakin kompetitif perlu direspon dengan strategi kebijakan yang mampu memastikan agar produk dalam negeri tetap memiliki daya saing dan diterima sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada konteks ini, infrastruktur standardisasi industri memiliki peran penting sebagai salah satu strategi kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri, karenanya perlu terus-menerus dimutakhirkan dan diperkuat untuk tetap relevan dengan laju perkembangan industri di tingkat lokal maupun global. Di sisi produsen, keberadaan standardisasi industri dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi ketika terdapat

standar proses yang jelas sebagai acuannya, memantik terciptanya inovasi produk sesuai standar, serta terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Sementara dari sisi konsumen, standardisasi dapat menjadi rujukan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang layak dikonsumsi. Lebih dari itu, standardisasi industri dapat pula menjadi instrumen untuk mendorong praktik industri yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan standardisasi industri bermuara pada tercapainya Sasaran Program kedua (SP 2) yaitu “Meningkatnya perusahaan industri yang produksinya terstandarisasi”. Tercapainya SP 2 ini didukung penuh oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 1.1 Meningkatkan standar bidang industri yang meningkat dapat dijadikan media (means) untuk meningkatkan produk dari perusahaan industri yang terstandarisasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap pelaksanaannya di lapangan perlu dipastikan melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri oleh BSKJI. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian, pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri.



Gambar 5. Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan inovasi teknologi yang berpotensi mendukung produktivitas industri perlu direspon melalui kebijakan yang mendorong industri untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatannya. Arah kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri sejalan dengan Sasaran Program ketiga (SP 3) yaitu “Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri”. Tercapainya SP ini didukung oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 4.1 Meningkatkan adopsi teknologi pada industri manufaktur dan SK 4.3 Terwujudnya jasa industri yang profesional. Kedua sasaran kegiatan ini didukung pula oleh penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta tumbuhnya ekosistem digitalisasi manufaktur dapat menjadi kontributor dalam upaya transformasi ekonomi di tingkat nasional.

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya adopsi teknologi industri dilakukan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapterapan teknologi dan industri penggunanya. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan melalui penguatan sektor industri untuk melakukan optimalisasi teknologi, konsultansi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), serta pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem digital manufaktur.



Gambar 6. Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Sementara itu, upaya mewujudkan jasa industri yang profesional diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas jasa industri, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap PDB Nasional. Sektor jasa industri terus bertumbuh seiring dengan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan pendukung industri manufaktur. Karenanya pengembangan dan pemanfaatan jasa industri perlu menjadi perhatian penting agar aktivitas usahanya dapat memberikan andil bagi perekonomian nasional.

Hanya saja kebijakan dan arah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa industri belum diletakkan dalam tata kelola yang lebih optimal. Aspek kelembagaan menjadi salah satu isu yang berpotensi memberi andil terhadap belum optimalnya tata kelola jasa industri, mengingat pengelolaannya saat ini dilekatkan pada unit kerja yang juga menangani fungsi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Opsi kelembagaan tersendiri yang secara khusus mengelola jasa industri patut dipertimbangkan, sehingga perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan, serta identifikasi jasa industri dapat dilaksanakan secara optimal.

Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

Pengelolaan industri berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/ material, energi, serta air di sektor industri yang apabila tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Maka dari itu transformasi industri manufaktur ke arah industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau diarahkan untuk mencapai Sasaran Program pertama (SP 1), yaitu “Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular”. Tercapainya SP ini didukung penuh oleh tiga Sasaran Kegiatan (SK) yaitu SK 3.1 Meningkatkan sertifikasi Industri Hijau (SIH); SK 3.2 Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri; dan SK 4.1 Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam rangka mendukung penurunan emisi GRK.



Gambar 7. Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Industri Hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam penggunaan bahan/ material, energi, dan air; pemanfaatan energi baru dan terbarukan; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimasi limbah yang menekankan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Penerapan industri hijau juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*, juga dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia.

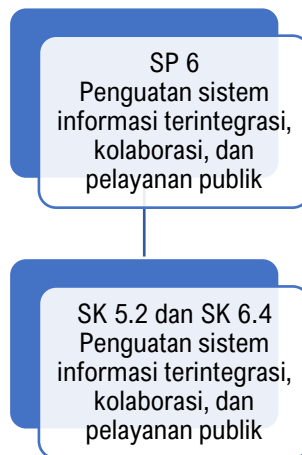
Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam dua Sasaran Program (SP) BSKJI, yaitu SP 5 “Terwujudnya SDM yang profesional”; SP 6 “Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik”, SP 7 “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, serta SP 8 “Penguatan akuntabilitas organisasi”.



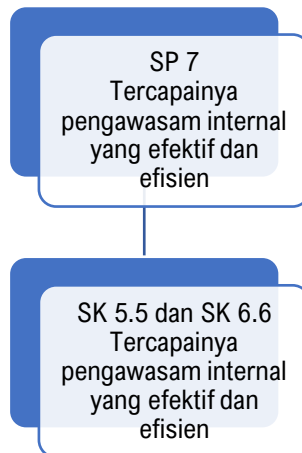
Gambar 8. Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 5 didukung oleh SK 5.1 dan SK 6.3 yang menyasar pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SK 5.1 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menyasar SDM BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.4 melekat pada UPT dan secara khusus menyasar SDM pelayanan jasa industri untuk mendukung SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



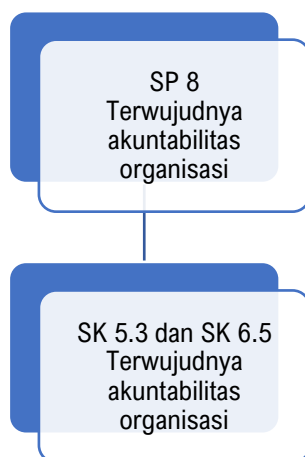
Gambar 9. Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 6 didukung oleh SK 5.2 yang melekat pada Sekretariat BSKJI dan SK 6.4 yang melekat pada UPT. Baik SK 5.2 maupun SK 6.4 sama-sama menyorot pada penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik.



Gambar 10. Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 7 didukung oleh SK 5.5 dan SK 6.6 yang sama-sama menyorot pada pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 5.5 melekat pada Sekretariat BSKJI, sedangkan SK 6.6 melekat pada UPT. Sementara itu, SP 8 didukung oleh SK 5.3 dan SK 6.5 yang sama-sama menyorot pada terwujudnya akuntabilitas organisasi. Sasaran ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat BSKJI dan UPT dengan beberapa indikator kegiatan seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI, satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A, dan nilai laporan keuangan BSKJI.



Gambar 11. Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata untuk sektor industri. Selanjutnya, UPT di lingkungan BSKJI akan didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa Sasaran Program BSKJI melekat pada UPT, pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda yang melekat pada Sasaran Program BSKJI diterjemahkan melalui Sasaran Kegiatan dan diwujudkan melalui Indikator Kinerja Kegiatan. BSPJI Samarinda melaksanakan aktivitas maupun kegiatan sebagai bentuk strategi pencapaian yang dianggap mampu untuk mencapai target yang diharapkan, namun tidak terbatas dan dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan penyesuaian.

Tabel 3. Indikator Kinerja dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Indikator

Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri		
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	<i>Temu Pelanggan</i>
TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>
			<i>Focus Group Discussion</i>
			<i>Webinar</i>

Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional		
IKK.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Uji Profesiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>
			<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>
			<i>Kalibrasi peralatan uji/proses produksi</i>
			<i>Sampling</i>
			<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>
			<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup</i>
IKK.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	<i>Pameran</i>
			<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri		
IKK.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	<i>Sampling</i>
			<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi</i>
			<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Sertifikasi Produk</i>
			<i>Kalibrasi In Situ</i>
IKK.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi</i>
			<i>Sampling</i>
			<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi</i>
			<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Pembimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>
			<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>
			<i>Kalibrasi In Situ</i>
IKK.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
			<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
			<i>Pengadaan Mebelair</i>
			<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
			<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>
IKK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	Persen	<i>Layanan Operasional Perkantoran</i>
			<i>Layanan Operasional Laboratorium</i>
			<i>Layanan Operasional Pendukung Perkantoran</i>
			<i>Langganan Daya dan Jasa</i>
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional		
IKK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi</i>
			<i>Peningkatan Kompetensi SDM Balai</i>
			<i>In House Training</i>
			<i>Peningkatan Potensi SDM</i>

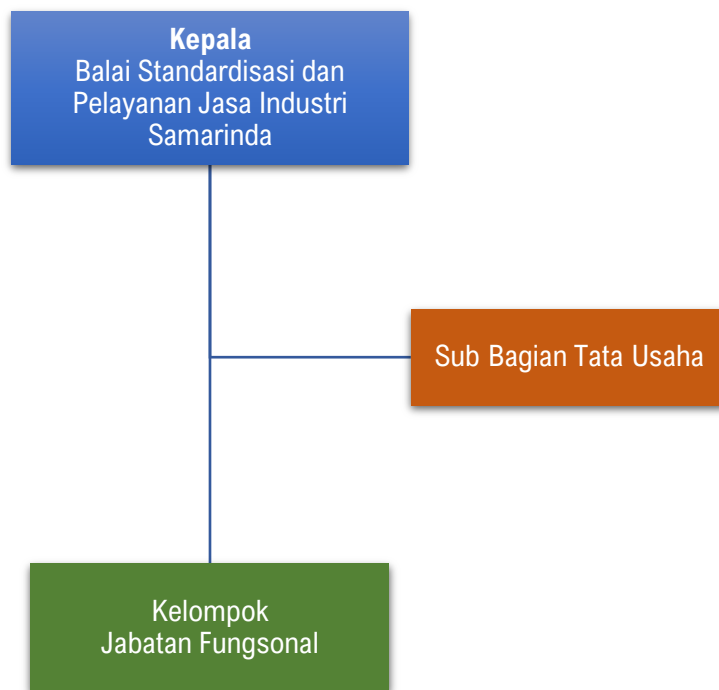
Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik		
IKK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	<i>Pengembangan Aplikasi</i>
IKK.4.2	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	<i>Pengembangan Aplikasi</i>
IKK.4.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	<i>Unit Pelayanan Publik</i>
			<i>Perawatan Gedung</i>
			<i>Perbaikan Peralatan Perkantoran</i>
			<i>Perawatan Kendaraan</i>
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien		
IKK.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	<i>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i>
			<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai</i>
IKK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	<i>Penatalaksanaan Kearsipan</i>
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi		
IKK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	<i>Penyusunan Program/Kegiatan</i>
			<i>Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen</i>
IKK.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	<i>Pelaporan Keuangan Akuntansi Negara (SAP)</i>
			<i>Penatausahaan BMN</i>
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri		
IKK.7.1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
			<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
			<i>Pengadaan Mebelair</i>
			<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
			<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>

Nomenklatur Program dan Kegiatan

BSPJI Samarinda melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan menjalankan program dan kegiatan antara lain :

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
- b. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

1. 3. Struktur Organisasi



Gambar 12. Struktur Organisasi BSPJI Samarinda

BAB II

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

2. 1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Perencanaan dan pelaksanaan kinerja 2025 merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029, yang akan dilaksanakan oleh organisasi melalui berbagai kegiatan secara tahunan yang berjenjang dan berkelanjutan. Proses perencanaan kinerja telah didokumentasikan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan target kinerja Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi organisasi untuk mencapainya dalam satu periode Tahun 2025, yang disusun setiap awal tahun anggaran.

Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda juga harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menyukseskan Tri Program Utama yang sedang dilaksanakan, yaitu pembangunan di bidang peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan pertanian dalam arti luas.

Pada tahun 2025 anggaran kegiatan BSPJI Samarinda yang tertuang dalam dokumen penganggaran DIPA terbagi dalam 2 Program antara lain :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kegiatan : 6077. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Klasifikasi Rincian Output :

- AEC. Kerja sama
- AEF. Sosialisasi dan Diseminasi
- BAD. Pelayanan Publik kepada industri
- BDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri
- CAH. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : 6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Klasifikasi Rincian Output :

- EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal
- EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- EBC. Layanan Manajemen SDM Internal
- EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal

2.1.1. Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025

Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025 sesuai DIPA tertera pada tabel berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
AEC	Kerja sama
002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
A	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis
A	<i>Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri</i>
B	<i>Temu Pelanggan</i>
C	<i>Pameran</i>
D	<i>Webinar</i>
E	<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>
F	<i>Unit Pelayanan Publik</i>
BAD	Pelayanan Publik kepada industri
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
A	<i>Pengujian Produk/ Proses Produksi</i>
B	<i>Sampling</i>
056	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi
A	<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri</i>
B	<i>Kalibrasi In Situ</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
A	<i>Sertifikasi Produk</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi
A	<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>
B	<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)</i>
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
A	<i>Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>
B	<i>Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk melalui Pembuatan Alat Pengering dan Alat Pengiris Mekanis</i>

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri
A	<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
A	<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
B	<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>
WA	Program Dukungan Manajemen
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
051	Pengelolaan Data dan Informasi
A	<i>Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi</i>
EBA.994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
A	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi</i>
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A	<i>Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen</i>
B	<i>Layanan Operasional Perkantoran</i>
C	<i>Layanan Operasional Laboratorium</i>
D	<i>Layanan Operasional Pendukung Perkantoran</i>
E	<i>Perawatan Gedung</i>
F	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>
G	<i>Perbaikan Peralatan Perkantoran</i>
H	<i>Perawatan Kendaraan</i>
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
EBB.951	Layanan Sarana Internal
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
A	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran
A	<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
B	<i>Pengadaan Mebelair</i>
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM
A	<i>Peningkatan Kompetensi SDM Balai</i>
B	<i>In House Training</i>
C	<i>Peningkatan Potensi SDM</i>
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
A	<i>Penyusunan Program/ Kegiatan</i>
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
A	<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai</i>
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
A	<i>Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)</i>
B	<i>Penatausahaan BMN</i>
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP
A	<i>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i>
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
051	Penyelenggaraan Kearsipan
A	<i>Penatalaksanaan Kearsipan</i>

2.1.2. Rincian Anggaran Tahun 2025

Rincian anggaran kegiatan standardisasi dan pelayanan jasa Industri tahun anggaran 2025 sesuai DIPA tertera pada tabel berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran Tahun 2025 (Revisi DIPA 15)

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5,465,505,000	1,161,408,000	4,304,097,000
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	5,465,505,000	1,161,408,000	4,304,097,000
AEC	Kerja sama	154,899,000	28,145,000	126,754,000
002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899,000	28,145,000	126,754,000
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899,000	28,145,000	126,754,000
A	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>	<i>154,899,000</i>	<i>28,145,000</i>	<i>126,754,000</i>
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	629,133,000	377,793,000	251,340,000
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	629,133,000	377,793,000	251,340,000
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	629,133,000	377,793,000	251,340,000
A	<i>Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri</i>	<i>69,227,000</i>	<i>69,227,000</i>	-
B	<i>Temu Pelanggan</i>	<i>187,280,000</i>	<i>187,280,000</i>	-
C	<i>Pameran</i>	<i>100,786,000</i>	<i>100,786,000</i>	-
D	<i>Webinar</i>	<i>8,000,000</i>	<i>8,000,000</i>	-
E	<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>	<i>146,740,000</i>	-	<i>146,740,000</i>
F	<i>Unit Pelayanan Publik</i>	<i>117,100,000</i>	<i>12,500,000</i>	<i>104,600,000</i>
BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2,353,451,000	89,562,000	2,263,889,000
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian	1,537,492,000	-	1,537,492,000
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	1,479,108,00	-	1,479,108,00
A	<i>Pengujian Produk/ Proses Produksi</i>	<i>1,006,108,000</i>	-	<i>1,006,108,000</i>
B	<i>Sampling</i>	<i>473,000,000</i>	-	<i>473,000,000</i>

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
056	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	58,384,000	-	58,384,000
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>	<i>58,384,000</i>	-	<i>58,384,000</i>
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	149,532,000	-	149,532,000
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	89,532,000	-	89,532,000
A	<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri</i>	<i>70,182,000</i>	-	<i>70,182,000</i>
B	<i>Kalibrasi In Situ</i>	<i>19,350,000</i>	-	<i>19,350,000</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	60,000,000	-	60,000,000
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>	<i>60,000,000</i>	-	<i>60,000,000</i>
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	481,955,000	89,562,000	392,393,000
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	82,569,000	13,044,000	69,525,000
A	<i>Sertifikasi Produk</i>	<i>82,569,000</i>	<i>13,044,000</i>	<i>69,525,000</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	399,386,000	76,518,000	322,868,000
A	<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>	<i>316,648,000</i>	<i>41,310,000</i>	<i>275,338,000</i>
B	<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)</i>	<i>82,738,000</i>	<i>35,208,000</i>	<i>47,530,000</i>
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	184,472,000	-	184,472,000
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	184,472,000	-	184,472,000
A	<i>Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>	<i>141,252,000</i>	-	<i>141,252,000</i>
B	<i>Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk melalui Pembuatan Alat Pengering dan Alat Pengiris Mekanis</i>	<i>43,220,000</i>	-	<i>43,220,000</i>
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	320,522,000	-	320,522,000
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri	320,522,000	-	320,522,000
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	320,522,000	-	320,522,000
A	<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>	<i>320,522,000</i>	-	<i>320,522,000</i>
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	2,007,500,000	665,908,000	1,341,592,000
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	2,007,500,000	665,908,000	1,341,592,000
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	2,007,500,000	665,908,000	1,341,592,000
A	<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>	<i>1,977,000,000</i>	<i>661,408,000</i>	<i>1,315,592,000</i>
B	<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>	<i>30,500,000</i>	<i>4,500,000</i>	<i>26,000,000</i>
WA	Program Dukungan Manajemen	14,190,981,000	1,426,053,000	12,764,928,000
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	14,190,981,000	1,426,053,000	12,764,928,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,776,995,000	648,327,000	12,128,668,000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000,000	-	150,000,000
051	Pengelolaan Data dan Informasi	150,000,000	-	150,000,000
A	<i>Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi</i>	<i>150,000,000</i>	-	<i>150,000,000</i>
EBA.994	Layanan Perkantoran	12,626,995,000	648,327,000	11,978,668,000

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
001	Gaji dan Tunjangan	8,218,073,000	-	8,218,073,000
A	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi	8,218,073,000	-	8,218,073,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,408,922,000	648,327,000	3,760,595,000
A	Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen	358,320,000	-	358,320,000
B	Layanan Operasional Perkantoran	2,086,085,000	648,327,000	1,437,785,000
C	Layanan Operasional Laboratorium	215,710,000	-	215,710,000
D	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran	192,794,000	-	192,794,000
E	Perawatan Gedung	389,324,000	-	389,324,000
F	Langganan Daya dan Jasa	614,029,000	-	614,029,000
G	Perbaikan Peralatan Perkantoran	420,910,000	-	420,910,000
H	Perawatan Kendaraan	131,750,000	-	131,750,000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	621,000,000	382,626,000	238,374,000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	621,000,000	382,626,000	238,374,000
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	331,000,000	243,000,000	88,000,000
A	Pengadaan Pengolah Data	331,000,000	243,000,000	88,000,000
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	290,000,000	139,626,000	150,374,000
A	Pengadaan Alat Perkantoran	231,000,000	139,626,000	91,374,000
B	Pengadaan Mebelair	59,000,000	-	59,000,000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	532,806,000	161,120,000	371,686,000
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806,000	161,120,000	371,686,000
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	532,806,000	161,120,000	371,686,000
A	Peningkatan Kompetensi SDM Balai	211,144,000	-	211,144,000
B	In House Training	109,942,000	-	109,942,000
C	Peningkatan Potensi SDM	211,720,000	161,120,000	50,600,000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	260,180,000	233,980,000	26,200,000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370,000	87,370,000	-
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	87,370,000	87,370,000	-
A	Penyusunan Program/ Kegiatan	87,370,000	87,370,000	-
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,110,000	71,110,000	-
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	71,110,000	71,110,000	-
A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai	71,110,000	71,110,000	-
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	75,500,000	75,500,000	-
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	75,500,000	75,500,000	-
A	Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)	39,088,000	39,088,000	-
B	Penatausahaan BMN	36,412,000	36,412,000	-
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	24,800,000	-	24,800,000
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	24,800,000	-	24,800,000
A	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	24,800,000	-	24,800,000
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,400,000	-	1,400,000
051	Penyelenggaraan Kearsipan	1,400,000	-	1,400,000
A	Penatalaksanaan Kearsipan	1,400,000	-	1,400,000
Total		19,656,486,000	2,587,461,000	17,069,025,000

2. 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

2.2.1. Sasaran dan Indikator Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai BSPJI Samarinda dalam rencana kerja tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis BSPJI Samarinda Tahun yang mengacu pada dokumen perencanaan institusi induk, yaitu Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan BSKJI Tahun 2025– 2029, yang terangkum dalam Matriks Alur IKU BSKJI adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri

Indikator Tujuan:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Cara Pengukuran:

Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuisioner dan indeks mengacu pada PermenPANRB 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.

Cara Pengukuran:

Menghitung jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di Satker pada tahun ke-n.

2. Sasaran Kinerja Pertama:

Terwujudnya layanan jasa industri yang professional

Indikator Kinerja:

a. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$$\% \text{ pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} = \frac{\sum \text{Pelayanan yang tepat waktu sesuai SLA}}{\sum \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

Catatan: Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.

b. Nilai Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.

Cara Menghitung:

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$$\text{NPS} = \% \text{ Promoters} - \% \text{ Detractors}$$

3. Sasaran Kinerja Kedua

Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

Indikator Kinerja:

a. Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

Cara Menghitung:

Menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n dan jumlah PNBP pada tahun n-1 dibagi A dikalikan 100%.

b. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam satu tahun.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n.

c. Nilai Revenue on Asset (RoA)

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

Cara Menghitung:

Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%.

d. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Cara Menghitung:

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

4. Sasaran Kinerja Ketiga

Terwujudnya SDM Profesional

Indikator Kinerja:

a. Indeks Profesionalitas ASN

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Cara Menghitung:

Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.

5. Sasaran Kinerja Keempat

Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja:

a. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

b. Tingkat Penerapan SPBE

Penerapan SPBE pada masing-masing Satuan Kerja.

Cara Menghitung:

Menghitung capaian LKE SPBE

c. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Cara Menghitung:

Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.

Catatan:

- Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.
- Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.

6. Sasaran Kegiatan Kelima

Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja :

a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

Cara Menghitung:

Hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker tahun n-1 dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker tahun n-1 dikalikan 100%.

b. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan) pada masing-masing Satuan Kerja.

Cara Menghitung:

Perhitungan nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada unit kearsipan merujuk pada Peraturan Arsip Nasional nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan.

7. Sasaran Kinerja Keenam

Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Indikator Kinerja:

a. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

Cara Menghitung:

Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian merujuk pada Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

b. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran.

Cara Menghitung:

Tata cara perhitungan IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 atau peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.

8. Sasaran Kinerja Ketujuh

Penguatan Layanan Publik

Indikator Kinerja:

a. Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

Cara Menghitung:

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:

$$RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$$

2.2.2. Indikator Kinerja berdasarkan Kegiatan

Tabel 6.Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		-	
EC.6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		-	
AEC	Kerja sama	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis yang dihasilkan	5	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan
AEC.002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		5	Dokumen
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		-	
A	Kerjasama dan Kemitraan		-	
AEF	Sosialisasi dan DiseminasiKesepakatan, Dokumen, Kegiatan	Capaian jumlah peserta yang mengikuti Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Layanan Teknis	500	Orang
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis		500	Orang
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis		-	
A	Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri		-	
B	Temu Pelanggan		-	
C	Pameran		-	
D	Webinar		-	
E	Promosi dan Pemasaran Layanan		-	

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
F	Unit Pelayanan Publik			
BAD	Pelayanan Publik kepada industri	Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa	386	Industri
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian		300	Industri
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian		-	
A	Pengujian Produk/ Proses Produksi		-	
B	Sampling		-	
056	Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi/ Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian		-	
A	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium		-	
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi		29	Industri
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi		-	
A	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri		-	
B	Kalibrasi In Situ		-	
052	Akreditasi/ Surveilance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi		-	
A	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi		-	
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi		44	Industri
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi		-	
A	Sertifikasi Produk		-	
052	Akreditasi/ Surveilance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi		-	
A	Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi/Witness)		-	
B	Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)		-	
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri		13	Industri
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri		-	
A	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri		-	
B	Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk melalui Pembuatan Alat Pengering dan Alat Pengiris Mekanis		-	
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Jumlah industri yang dibina	10	Industri, IKM, Miliar, USD
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri		10	Industri
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri		-	
A	Konsultasi dan Pembinaan Industri		-	
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah sarana peralatan dan mesin untuk menunjang workshop/layanan/lab	59	Unit
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		59	Unit
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		-	

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
A	Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian		-	
B	Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium		-	
WA	Program Dukungan Manajemen		-	
WA.6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri		-	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Terselenggaranya layanan manajemen internal Satker	2	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	Layanan
051	Pengelolaan Data dan Informasi		-	
A	Pengelolaan Data dan Informasi		-	
EBA.994	Layanan Perkantoran		1	Layanan
001	Gaji dan Tunjangan		-	
A	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi		-	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		-	
A	Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen		-	
B	Layanan Operasional Perkantoran		-	
C	Layanan Operasional Laboratorium		-	
D	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran		-	
E	Perawatan Gedung		-	
F	Langganan Daya dan Jasa		-	
G	Perbaikan Peralatan Perkantoran		-	
H	Perawatan Kendaraan		-	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tersedianya layanan sarana dan prasarana internal	37	Unit, m2, Paket
EBB.951	Layanan Sarana Internal		37	Unit
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		-	
A	Pengadaan Pengolah Data		-	
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran		-	
A	Pengadaan Alat Perkantoran		-	
B	Pengadaan Mebelair		-	
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	52	Orang, Layanan, Rekomendasi
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		52	Orang
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM		-	
A	Peningkatan Kompetensi SDM Balai		-	
B	In House Training		-	
C	Peningkatan Potensi SDM		-	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal	6	Dokumen, Layanan, Laporan, Laporan, Rekomendasi
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	Dokumen

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		-	
A	Penyusunan Program/ Kegiatan		-	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		-	
A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai		-	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		2	Dokumen
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		-	
A	Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)		-	
B	Penatausahaan BMN		-	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1	Dokumen
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP		-	
A	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		-	
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1	Dokumen
051	Penyelenggaraan Kearsipan		-	
A	Penatalaksanaan Kearsipan		-	

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan III tahun anggaran 2025, BSPJI Samarinda telah melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja maupun rencana Aksi TA. 2025. Progres realisasi fisik dari target Perjakin hingga triwulan III mencapai 77,76%. Capaian ini sesuai dengan target yang tertuang dalam rencana aksi BSPJI Samarinda tahun 2025.

Capaian kinerja BSPJI Samarinda juga mencakup capaian indikator kinerja kegiatan dalam Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Capaian kinerja keuangan telah terealisasi sebesar 70,13% menurut Aplikasi SAKTI berbasis akrual terhadap pagu efektif. Sementara berdasarkan Sistem Informasi Keuangan Intranew diperoleh capaian kinerja keuangan sebesar 69,0% berbasis akrual terhadap pagu efektif sedangkan menurut aplikasi OMSPAN adalah sebesar 56,76%% terhadap pagu total. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan capaian kinerja keuangan berdasarkan masing-masing sumber, hal ini disebabkan terdapat beberapa transaksi yang masih dalam proses penerbitan SP2D. Capaian kinerja keuangan belum memenuhi target yang ditetapkan oleh BSKJI untuk triwulan III yaitu 72,30%. Adapun capaian kinerja fisik menurut perhitungan realisasi fisik perjanjian kinerja diperoleh sebesar 77,76% dan telah melebihi target yang ditetapkan oleh BSKJI yaitu 75%.

Pada pelaksanaan kegiatan BSPJI Samarinda menerapkan optimalisasi sumber daya baik anggaran, SDM serta sarana dan prasarana yang dimaksudkan agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat menunjang tercapainya seluruh target tersebut. Langkah optimalisasi sumber daya diharapkan berdampak pada terciptanya efisiensi anggaran. Pada Triwulan III telah dilakukan 1 kali revisi DIPA kewenangan DJA, 1 kali revisi DIPA kewenangan Kanwil, dan 3 kali revisi DIPA kewenangan KPA. Revisi DIPA kewenangan DJA dilaksanakan dalam rangka relaksasi blokir belanja sehingga total blokir menjadi sebesar Rp. 2,587,461,000 dari total pagu sebesar Rp. 19,656,486,000. Selanjutnya, revisi kewenangan Kanwil dilakukan dalam rangka pemutakhiran Halaman III DIPA. Selanjutnya, revisi DIPA kewenangan KPA maupun revisi POK dilaksanakan dalam rangka revisi administrasi. Dengan berakhirnya Triwulan III, maka secara keseluruhan BSPJI Samarinda telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 15 kali dalam Tahun 2025.

Tabel 7. Rencana Aksi TA. 2025

Unit Organisasi : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi																		
						Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV						
						Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan					
1	2	3		4		5	6			7	8			9	10			11	12					
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,66	Indeks	24%	1	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target			48%	4	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target			72%	7	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target			100%	10	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	
							2	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				5	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				8	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				11	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	
							3	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				6	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				9	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				12	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
		TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	210	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	25%	1	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Penyusunan jadwal audit perusahaan dan pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal serta Sertifikasi produk	50%	4	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri	75%	7	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi	100%	10	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri
							2	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d) Pelaksanaan layanan Verifikasi dan Pembinaan SDM Industri e) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		5	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		8	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		11	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
							3	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Pembinaan SDM Industri e) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		6	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultansi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		9	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultansi, dan Pembinaan SDM Industri d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		12	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	SK.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86,00	Persen	25%	1	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	50%	4	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	75%	7	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	100%	10	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi																			
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan												
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12												
							2	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		5	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		8	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		11	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan								
							3	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		6	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		9	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		12	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan								
							SK.1.2 Nilai Net Promoter Score (NPS)			6	Nilai		24%	1		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	48%	4	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	72%	7	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	100%	10	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial
														2		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		5	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		8	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		11	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial
														3		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		6	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		9	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		12	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	SK.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9,22	Persen	25%	1	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	50%	4	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	75%	7	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	100%	10	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA
							2	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		5	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		8	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		11	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							3 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		6 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		9 a) Melakukan) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		12) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA
		SK.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	4545	Hasil Layanan	25%	1 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	50%	4 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	75%	7 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	100%	10 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		5 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		8 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		11 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA
							3 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		6 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		9 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		12 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA
		SK.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	8,10	Persen	20%	1 a) Penyampaian Laporan b) Pengawasan BMN untuk TA. 2024 c) Penyiapan konsep laporan BMN d) Inventarisasi BMN yang akan diusulkan penghapusan	45%	4 a) Lanjutan proses pengadaan Mebelair b) Proses Lelang Barang Inventaris Kantor c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL	70%	7 a) Penyampaian Lap. Wasdal Semester I b) Pengusulan PSP untuk pengadaan Semester 1 c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL d) Penyusunan Laporan BMN Semester 1 2025	100%	10 a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Lanjutan Pengadaan Mebelair dan Inventaris Kantor Lainnya

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12				
							2	a) Koordinasi dengan KPKNL terkait usulan proses penghapusan b) Hunting Penyedia pengadaan alat laboratorium & pengolah data melalui E-Catalog c) Proses Pengadaan Alat Laboratorium & Pengolah Data Reviu Laporan BMN Unaudited TA. 2024 d) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		5	a) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Lelang Inventaris kantor b) Hunting Penyedia dan Koordinasi terkait pengadaan AC, dll c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		8	a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APiP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1		11	a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Penyelesaian To Do List Triwulan III
							3	a) Penyiapan dokumen usulan penghapusan BMN b) Pelaksanaan pemeliharaan Gedung kantor c) Penyiapan proses pengadaan meubelair d) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		6	a) Pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan Gedung kantor tahap 2 b) Pengusulan RKBMN c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		9	a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APiP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1		12	a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Pengusulan PSP untuk pengadaan belanja modal Semester 2 c) Perhitungan dan Evaluasi capaian nilai ROA d) Penyelesaian To Do List Triwulan III
		SK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	41,50	Persen	20%	1	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBp BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBp BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBp BLU	50%	4	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBp BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBp BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBp BLU	75%	7	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBp BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBp BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	100%	10	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBp BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBp BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBp BLU

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU		5 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		8 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU		11 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU
							3 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		6 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU		9 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		12 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU
4	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	82,96	Indeks	25%	1 a) Membuat laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi TA. 2024 b) Identifikasi kebutuhan pelatihan dari masing-masing Ketua Tim c) Perencanaan pelatihan pengadaan Barang/Jasa	50%	4 Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan	75%	7 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Penetapan nilai sementara IP ASN Semester I	100%	10 a) Evaluasi kebutuhan pelatihan dengan ketersediaan anggaran b) Revisi anggaran pengembangan kompetensi (bila diperlukan)

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2 a) Membuat program pelatihan tahun 2025 b) Pelaksanaan pelatihan bidang sertifikasi dan pengujian		5 Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan		8 Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 1		11 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi terkait pengembangan layanan
							3 a) Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan I b) Revisi kegiatan pengembangan kompetensi		6 a) Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan b) Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan II		9 Pelaksanaan Pelatihan pengembangan kompetensi non teknis (In House Training)		12 Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 2
							1 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA		4 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA		7 Membuat perencanaan pengembangan aplikasi SILABISA		10 Melakukan pengujian pengembangan aplikasi SILABISA
							2 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA		5 Membuat Analisis Kebutuhan pengembangan aplikasi SILABISA		8 Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA		11 Melakukan Implementasi pengembangan aplikasi SILABISA
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	SK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	15%	3 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	40%	6 Membuat Analisis Kebutuhan pengembangan aplikasi SILABISA	80%	9 Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA	100%	12 Kegiatan selesai
							1 Membuat data dukung LKE SPBE		4 Membuat data dukung LKE SPBE		7 Membuat data dukung LKE SPBE		10 Membuat data dukung LKE SPBE
							2 Membuat data dukung LKE SPBE		5 Membuat data dukung LKE SPBE		8 Membuat data dukung LKE SPBE		11 Membuat data dukung LKE SPBE
		SK.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	Persen	15%	3 Membuat data dukung LKE SPBE	35%	6 Membuat data dukung LKE SPBE	70%	9 Membuat data dukung LKE SPBE	100%	12 Kegiatan selesai

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
						Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
		SK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	Indeks	15%	1	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	40%	4	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	70%	7	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	100%	10	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
							2	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		5	a). Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan e) Penyusunan perubahan SPM		8	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		11	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
							3	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		6	a). Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduane) Penyusunan perubahan SPM		9	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		12	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50,00	Persen	20%	1	Menyelesaikan seluruh bukti pertanggungjawaban keuangan kegiatan TA. 2024	80%	4	Mereviu Laporan hasil Pemeriksaan Audit Kinerja	100%	7	Monitoring progress penyampaian tindak lanjut LHP Ke Sekretariat Inspektorat Jenderal		10	Kegiatan selesai
							2	Pengumpulan permintaan data dukung untuk keperluan Audit Kinerja Inspektorat		5	Menyelesaikan saran-saran tindaklanjut audit kinerja yang tercantum dalam LHP		8	Reviu Tindak Lanjut LHP oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal		11	Kegiatan selesai

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
						Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
							3	Koordinasi dengan tim auditor terkait jadwal rencana audit		6	Penyampaian hasil tindak lanjut audit kinerja ke Sekretariat Inspektorat Jebderal		9	Kegiatan selesai		12	Kegiatan selesai
		SK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	94,98	Nilai	20%	1	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan sarana penyimpanan arsip aktif menggunakan Filling Cabinet, sekat guide Primer, Skunder dan Tersier	50%	4	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan penyimpanan arsip aktif di Ruang Central File	80%	7	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Januari – Juni)	100%	10	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melaksanakan pemberkasan arsip aktif
							2	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan out indicator arsip aktif yang digunakan dalam peminjaman arsip aktif c) Menyajikan arsip aktif bagi kepentingan internal		5	a)nPengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan pengelolaan arsip vital c) Melakukan perlindungan arsip vital		8	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyusun daftar arsip aktif		11	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melaksankan penyimpanan arsip aktif
							3	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penerapan SRIKANDI c) Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas		6	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penarapan SRIKANDI c) Menginput daftar arsip aktif		9	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penarapan srikandi c) Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas arsip aktif		12	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Juli-Desember) c) Melaksanakan Pemindahan arsip dari unit pengolah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip mewakili fungsi satker d) Membuat berita acara pemindahan arsip

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,45	Nilai	25%	1	a) Penyelesaian dan Reviu LAK 2024 b) Penyusunan Revisi RSB 2023-2027 c) Rapat Kerja 2025	50%	4	a) Penyusunan Laporan PP39 TW 1 b) Penyusunan Renstra 2025-2029	75%	7	Penyusunan Laporan PP 39 TW 2	100%	10	a) Penyusunan Laporan PP 39 TW 3 b) Penyusunan RBA Indikatif TA.2027
							2	a) Kick Off Pelaksanaan Kegiatan TA. 2025b) Penyusunan Renkin TA. 2026 c) Evaluasi SAKIP TA. 2024		5	a) Reviu Internal KAK RAB dan data dukung TA. 2026b) Penyusunan RBA 2026 definitive		8	Reviu APIP KAK RAB dan Data dukung TA. 2026		11	a) Penyusunan TRPNBP TA. 2027b) Rapat Monev TW 4
							3	a) Pengumpulan usulan KAK RAB dan data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 1 c) Pelaporan Monev BAPPENAS		6	a) Penyesuaian Pagu Indikatif TA. 2026 b) Rapat Monev TW 2 c) Pelaporan Monev BAPPENAS		9	a) Reviu DJA KAK RAB dan Data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 3 c) Pelaporan Monev BAPPENAS		12	a) Penyusunan Renja TA. 2026 b) Pelaporan Monev BAPPENAS c) Penyusunan Laporan PP 39 TW 4
		SK.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18	Nilai	24%	1	a) Revisi DIPA awal dan Pencantuman Saldo Awal b) Penyusunan Rencana Belanja per Kegiatan (Sub Komponen) c) Pengajuan UP d) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Januari	48%	4	a) Pelaporan CAPUT Maret b) Revisi DIPA TW 2 Pemutakhiran RPD (maks 10 April) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja April d) Pengajuan GUP April	72%	7	a) Pelaporan CAPUT Juni b) Revisi DIPA TW 3 Pemutakhiran RPD (maks 10 Juli) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juli d) Pengajuan GUP Juli	100%	10	a) Pelaporan CAPUT September b) Revisi DIPA TW 4 Pemutakhiran RPD (maks 10 Oktober) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Oktober d) Pengajuan GUP Oktober
							2	a) Penyusunan RPD (maks 10 Februari) b) Pelaporan CAPUT Januari c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Februari d) Pengajuan GUP Februari		5	a) Pelaporan CAPUT April b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Mei c) Pengajuan GUP Mei		8	a) Pelaporan CAPUT Juli b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Agustus c) Pengajuan GUP Agustus		11	a) Pelaporan CAPUT Oktober b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja November b) Pengajuan TUP Pengajuan GUP November
							3	a) Pelaporan CAPUT Februari b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Maret c) Pengajuan GUP Maret d) Monev Penyerapan Anggaran TW 1		6	a) Pelaporan CAPUT Mei b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juni c) Pengajuan GUP Juni d) Monev Penyerapan Anggaran TW 2		9	a) Pelaporan CAPUT Agustus b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja September c) Pengajuan GUP September d) Monev Penyerapan Anggaran TW 3		12	a) Pelaporan CAPUT November b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Desember c) GUP/TUP Nihil d) Monev Penyerapan Anggaran TW 4

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi																		
						Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV						
						Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan					
1	2	3		4		5	6			7	8			9	10			11	12					
8	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.7.1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	80,00	Persen	20%	1	Penginputan data pengadaan pada aplikasi SIRUP			45%	4	Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan I 2024			75%	7	a) Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium b) Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan II 2024			100%	10	Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan III & IV 2024	
							2	Tagging proses pengadaan dan pengumuman paket pengadaan pada LPSE				5	Koordinasi pelaksanaan pengadaan tambahan alat laboratorium				8	Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa				11	Evaluasi capaian penggunaan TKD pada pengadaan barang/ jasa Semester II TA. 2024	
							3	a) Pelaksanaan pengadaan alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium b) Pengusulan Izin Import untuk alat laboratorium dan Bahan Kimia				6	Monitoring capaian penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I dan monitoring progress usulan izin impor				9	Proses Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium				12	Evaluasi penyelesaian pengadaan barang/ jasa	
						22%					49%					76%					100%			

3.3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pada perjanjian kinerja tahun 2025 terdapat 1 (satu) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dengan total 17 (tujuh belas) indikator yang harus dicapai. BSPJI Samarinda melaksanakan seluruh kegiatan dengan berfokus pada seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja yang optimal dan mampu memberikan *outcome* bagi masyarakat serta mencapai tujuan yang telah tertuang dalam renstra. Realisasi capaian kinerja BSPJI Samarinda berdasarkan indikator pada Perjanjian Kinerja dilaksanakan berdasarkan rencana aksi. Pada Triwulan III diperoleh rata-rata capaian realisasi masing-masing indikator kinerja sebesar 119,23%.

Pada Tujuan Kegiatan, yakni **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri**, untuk indikator pertama *“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”*, pada Triwulan III telah diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,86 dengan mutu pelayanan 96,58 (Sangat Baik). Selanjutnya indikator kedua *“Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri”*, pada Triwulan III terdapat 246 perusahaan yang telah memanfaatkan layanan jasa industri BSPJI Samarinda.

Pada Sasaran Kegiatan pertama, yakni **Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional**, untuk indikator pertama *“Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)”*, pada Triwulan III diperoleh capaian SLA sebesar 97,28% untuk seluruh layanan jasa di BSPJI Samarinda. Selanjutnya, indikator kedua *“Nilai Net Promoter Score (NPS)”*, pada Triwulan III telah dilakukan penyampaian survei NPS dan telah diperoleh nilai NPS sebesar 69,44 dari 36 orang responden yang merupakan pelanggan BSPJI Samarinda.

Pada sasaran kegiatan kedua, yakni **Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri**, untuk indikator pertama *“Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”*, pada Triwulan III diperoleh penerimaan PNBP sebesar Rp. 3.886.665.448. Selanjutnya, indikator kedua *“Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri”*, pada Triwulan III diperoleh jumlah layanan jasa yang telah digunakan oleh pelanggan BSPJI Samarinda sebanyak 3903 order. Pada indikator ketiga, *“Nilai Revenue on Asset (RoA)”*, pada Triwulan III telah dilakukan perhitungan RoA dengan hasil sebesar 9,95%. Pada indikator keempat, *“Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)”*, pada Triwulan III berdasarkan perhitungan diperoleh rasio POBO sebesar 39,05%.

Pada sasaran kegiatan ketiga, yakni **Terwujudnya SDM Profesional**, dengan indikator *“Indeks Profesionalitas ASN”*, dilaksanakan melalui pengukuran IP ASN berdasarkan data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja seluruh pegawai, dengan hasil penilaian IP ASN dari Biro OSDM pada Intranet sebesar 83,18.

Pada sasaran kegiatan keempat, yakni **Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik**, untuk indikator pertama *“Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI”*, pada triwulan III proses integrasi telah sampai pada tahap pengembangan modul API Client di SILABISA. Selanjutnya, indikator kedua *“Tingkat Penerapan SPBE”*, pada Triwulan III telah dilakukan pengisian Kertas Kerja Perhitungan Indikator Kinerja SPBE dengan perolehan nilai sebesar 47,325. Pada indikator ketiga, *“Indeks Pelayanan Publik (IPP)”*, pada Triwulan III diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,70 dan masuk dalam kategori “A” yang bermakna “Pelayanan Prima”.

Pada sasaran kegiatan kelima, **Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**, indikator pertama *“Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker”*, pada Triwulan III telah diterima surat balasan dari Inspektur Jenderal Wilayah III Kementerian Perindustrian yang menyatakan bahwa seluruh temuan telah ditindaklanjuti dan selesai sesuai dengan lingkup program dan keuangan yang telah diaudit. Indikator kedua, *“Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)”* pada Triwulan III dilakukan kegiatan pembuatan daftar arsip inaktif tidak melewati retensi arsip, penyimpanan arsip inaktif media kertas di dalam folder atau sampul, pemberkasan arsip inaktif berdasarkan klasifikasi mewakili seluruh fungsi satker, dan penyimpanan arsip inaktif di ruang *record center*.

Pada sasaran keenam, **Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi**, pada indikator pertama *“Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker”*, dimana pada triwulan II penilaian SAKIP telah dilaksanakan dan diperoleh bahwa nilai SAKIP BSPJI Samarinda sebesar 85,40. Pada indikator kedua, *“Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)”*, pada triwulan ini diperoleh nilai IKPA sebesar 96,25.

Pada sasaran ketujuh, **Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri** dengan indikator *“Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”*, pada Triwulan III telah diperoleh capaian Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 85,39%.

Tabel Realisasi Rencana Aksi Sampai Triwulan III TA. 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda dapat dilihat pada bagian lampiran. Selanjutnya, berikut pembahasan masing-masing capaian indikator kinerja pada Triwulan III:

TJ : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Tabel 8. Capaian Kinerja TJ

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,66	3,86	105,46%	72	72	B7: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target B8: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target B9: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B7: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan B8: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan B9: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan c) Melakukan analisis hasil survey kepuasan pelanggan kepada responden yang memberi nilai di bawah 3,66
		Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	210	246	117,14%	75	85	B7: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi B8: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi	B7: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan peningkatan kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk B9: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk	program promosi penawaran harga B8: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan peningkatan kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga B9: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan peningkatan kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indikator Tujuan 1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 72% dengan realisasi 72%.

Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan akhir Triwulan III adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA, pemantauan pengaduan pelanggan, serta melakukan analisis hasil survey kepuasan pelanggan kepada responden yang memberi nilai di bawah 3,66.

Hasil survei indeks kepuasan masyarakat sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025 diperoleh dari penilaian 167 responden dari jumlah total sebanyak 213 pengguna jasa. Keseluruhan responden yang melakukan survey merupakan pengguna jasa dengan layanan jasa Pengujian, sedangkan layanan jasa selain pengujian belum terdapat responden yang melakukan pengisian pada survey. Pada hasil survey yang diperoleh terdapat 17 responden yang memberi nilai <3,66 dengan rata - rata nilai unsur terendah terdapat pada unsur “waktu pelayanan” dan juga “biaya/tarif”.

Berdasarkan data survei yang diterima, penilaian indeks responden dapat dikelompokkan seperti tabel berikut:

Tabel 9. Klasifikasi Nilai Indeks

Indeks 1 (1,00-2,59996)	Indeks 2 (>=2,6-<3,064)	Indeks 3 (>=3,064-<3,5324)	Indeks 4 (>=3,5324 - 4,000)	Total Responden	Jumlah Pegguna Jasa
0	2	12	153	167	243

Nilai perolehan indeks kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah 3,86 dengan mutu pelayanan 96,58 (Sangat Baik) sesuai dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 10. Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata unsur	Nilai rata-rata (NRR) Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,92	0,43
U2	Prosedur	3,92	0,43
U3	Waktu pelayanan	3,86	0,42
U4	Biaya/Tarif	3,87	0,43
U5	Produk layanan	3,91	0,43
U6	Kompetensi Pelaksana	3,89	0,43
U7	Perilaku Pelaksana	3,92	0,43
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,92	0,43
U9	Sarana dan Prasarana	3,91	0,43
Indeks Kepuasan Masyarakat ($\sum$ NRR Tertimbang)			3,86
IKM Unit Pelayanan ($\sum$ NRR Tertimbang x 25)			96,58
Mutu Pelayanan			Sangat Baik

Berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan III tahun 2025, maka hasil yang diperoleh 3,86 dengan mutu pelayanan 96,58 (Sangat Baik), telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,66 dengan capaian sebesar 105,46%.

b) Kendala

- Pelaksanaan survei yang masih menggunakan metode konvensional pada beberapa layanan jasa sehingga tingkat partisipasi responden belum mencakup semua pengguna jasa.
- Adanya keterbatasan petugas dalam memonitoring pengguna jasa apakah telah melakukan survei secara konvensional pada layanan selain jasa pengujian karena sifat pengisiannya sukarela.
- Kurangnya pengetahuan responden akan pentingnya dilakukan survei kepuasan masyarakat dan keterbatasan SDM responden dalam melakukan survei.
- Beberapa responden memberikan penilaian survei kurang baik karena hasil uji sample pada layanan pengujian tidak sesuai harapan pengguna jasa

c) Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini, maka rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya meliputi:

- Evaluasi responden yang memberi nilai di bawah target guna mengidentifikasi permasalahan dan menyusun langkah perbaikan yang tepat.
- Perbaikan pada unsur dengan nilai terendah yaitu "*Waktu Pelayanan*" dan "*Biaya/Tarif*" dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

- Pendekatan secara langsung kepada responden yang memberikan nilai terendah, yaitu: PT. Unicorn Tosan Perkasa (*nilai 2,78*), dan PT. United Tractors, Tbk Balikpapan (*nilai 3,00*) untuk mendapatkan informasi terkait kendala yang dihadapi.
- Pengembangan pada SIL dengan menyediakan sistem pengisian survei untuk layanan jasa selain pengujian, sehingga jumlah responden dapat sesuai dengan jumlah pengguna jasa serta diperoleh nilai survei SKM secara *real time*.
- Melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya survei kepuasan masyarakat melalui media sosial serta himbauan langsung kepada pengguna jasa, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan jumlah responden pada survei berikutnya.

Indikator Tujuan 2: Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri.

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI pada tahun berjalan.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 85%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan III adalah pelaksanaan layanan jasa seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri dengan rincian sebagai berikut:

- Proses sertifikasi produk di PT. Air Kristal Lestari, PT Beratustirta Giriagung, PT. Allesia International, dan CV Usna Karya
- Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu di PT. Difusi Golden Utama dan PT Berkah Sumber Tirta
- Pendampingan pendaftaran merek untuk Hak Cipta kepada Industri Kecil Menengah
- Pendampingan penyusunan Dokumen HACCP
- Pelatihan ISO 17025:20217
- Verifikasi TKDN Industri
- Pelatihan SDM Industri Uji Mikrobiologi
- Narasumber Industri Hijau, SIINas dan satu paket Moderator

Pada Triwulan III juga telah dilakukan pengembangan ruang lingkup layanan seperti pengembangan pengembangan parameter aneka komoditi seperti makanan, kosmetik, tangki air, air minum ph tinggi dan aneka komoditi lainnya. Selain itu, juga dilakukan pengajuan peningkatan kualifikasi Lembaga Pemeriksa Halal menjadi LPH Utama dan pengembangan penambahan ruang lingkup

seperti penyembelihan dan barang gunaan. Pengembangan layanan ini dilakukan guna meningkatkan jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan layanan jasa industri.

Selanjutnya pada Triwulan III juga dilakukan pemanfaatan database industri potensial area Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai referensi dalam melakukan kegiatan audiensi layanan dan penjajakan kerjasama. Kemudian melakukan perbaikan dan update data pada booklet layanan secara berkala sesuai dengan pengembangan layanan yang telah dilakukan, meningkatkan kualitas pelayanan lebih efektif dan efisien dengan pembuatan sistem penawaran harga melalui aplikasi SILABISA, memberikan program – program layanan promosi untuk meningkatkan serta melakukan evaluasi perbaikan layanan melalui survei kepuasan pelanggan.

Adapun jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa pada Triwulan III ada sebanyak 246 Industri dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri

Jenis Layanan	sd. TW II	Jul	Agt	Sep	*Total Industri Triwulan III
Pengujian	160	64	49	65	210
Kalibrasi	5	2	5	-	8
Sertifikasi	8	1	-	3	10
Pemeriksaan Halal	2	-	-	2	4
Pelatihan	2	1	1	-	4
Konsultansi	2	1	2	1	4
Verifikasi TKDN	1	-	1	-	2
Penggunaan SDM	2	-	1	1	4
Penggunaan Aset	-	-	-	-	-
Total Keseluruhan	182	69	59	72	246

** jumlah perusahaan industri tanpa memperhitungkan perulangan order*

Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan layanan jasa industri pada periode Triwulan III tahun 2025 mencapai 246 perusahaan terhadap target 210 perusahaan sehingga diperoleh capaian sebesar 117,14%.

b) Kendala

Adapun kendala pada Triwulan III adalah:

- Adanya penghematan anggaran pemerintah berdampak pada jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa, khususnya dari Dinas Kota/Kabupaten berkurang yang sebelumnya telah dikoordinasikan.
- Waktu penyelesaiannya proses sertifikasi produk terkendala dengan proses verifikasi yang memerlukan waktu yang cukup lama di SIINas.
- Penambahan lingkup layanan yang dibutuhkan pelanggan seperti layanan kalibrasi dan pengujian aneka komoditi belum bisa sepenuhnya dilakukan dikarenakan keterbatasan sumber daya terutama peralatan pendukung.

- Dari total 246 industri pengguna layanan, sebanyak 210 atau sekitar 85% merupakan pengguna layanan pengujian. Hal ini menunjukkan dominasi satu jenis layanan sehingga layanan lain (kalibrasi, sertifikasi produk, pelatihan, konsultasi, dll.) belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna jasa. Walaupun target capaian industri telah terpenuhi (117,14%), namun kontribusi capaian masih sangat bergantung pada layanan pengujian. Hal ini dapat menjadi kendala untuk keberlanjutan pencapaian target kedepannya jika tidak ada penguatan pada layanan lain.
- Pada triwulan III dilakukan penyesuaian pada jumlah jenis layanan dengan penambahan jenis layanan “penggunaan aset”. Pada nilai PNBK yang diterima sudah terdapat pengguna layanan penunjang pemanfaatan aset berupa penyewaan kendaraan operasional sampling, namun pada invoice ke perusahaan masih tergabung pada layanan jasa pengujian sehingga belum dilakukan penghitungan jumlah pelanggan pada layanan penggunaan aset.
- Upaya pengembangan seperti pembuatan sistem penawaran harga melalui aplikasi SILABISA dan update booklet layanan sudah dilakukan, namun hasilnya belum terlihat signifikan pada layanan selain pengujian. Sehingga perlunya strategi promosi yang lebih terfokus pada layanan yang masih kurang diminati.

c) Tindak Lanjut

Adapun tindak lanjut pada triwulan selanjutnya adalah:

- Pelaksanaan promosi dan koordinasi di beberapa industri/pelaku usaha dan Dinas Kota/Kabupaten terkait layanan yang potensial untuk digunakan industri/pelaku usaha dengan memanfaatkan media digital, booklet layanan, dan testimoni pengguna jasa untuk meningkatkan *awareness* pelanggan.
- Koordinasi dengan P4SI Kemeperin dan memantau proses sertifikasi melalui SIINas secara rutin.
- Melakukan kajian terhadap lingkup layanan yang akan dikembangkan dengan menyesuaikan sumber daya yang ada. Melakukan optimalisasi terhadap layanan permintaan pelanggan disesuaikan dengan ketersediaan bahan kimia, peralatan dan metode uji.
- Melakukan diversifikasi layanan dengan melakukan sosialisasi dan promosi khusus untuk layanan non-pengujian (kalibrasi, sertifikasi produk, halal, pelatihan, TKDN, dan penggunaan aset), serta membuat paket layanan terpadu (*bundling service*) agar industri terdorong memanfaatkan lebih dari satu jenis layanan.
- Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur peningkatan pemanfaatan layanan non-pengujian serta menggunakan hasil survei kepuasan pelanggan sebagai dasar perbaikan kualitas dan penyesuaian strategi promosi

SK 1 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional

Tabel 12. Capaian Kinerja SK 1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86,00	97,28	113,12%	75	75	B7: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan B8: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan B9: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B7: Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa, melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi B8: Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa, melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi B9: Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa, melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi
		Nilai Net Promoter Score (NPS)	6	69,44	1157,33%	72	72	B7: Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial B8:	B7: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial B9: Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	b) Melakukan Survey Net Promoter Score (NPS) B8: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survey Net Promoter Score (NPS) B9: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survey Net Promoter Score (NPS)

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indikator Kinerja 1: Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 75%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tercapainya target waktu penyelesaian layanan jasa teknis industri serta melakukan identifikasi dan tindak lanjut terhadap kendala pencapaian sasaran. Adapun jenis layanan jasa industri yang dimaksud berupa layanan jasa pengujian dan kalibrasi, layanan jasa sertifikasi, layanan jasa konsultasi.

Adapun capaian pada masing-masing SLA untuk jasa layanan di BSPJI Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi SLA

No	Jenis Layanan	Capaian Mutu sesuai SLA (%)								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
1	Pengujian dan Kalibrasi	96,11	94,32	100	62,37	91,60	100	94,46	95,57	100
2	Sertifikasi	-	100	-	100	100	100	100	100	100
3	Bimbingan dan Konsultasi	-	100	-	100	100	100	100	100	100
Rata-rata		96,11	98,11	100	87,46	97,20	100	98,15	98,52	100
Rata-rata s.d. TW II		97,28								

Hasil capaian mutu (target penyelesaian) layanan jasa teknis pada Triwulan II adalah sebesar 96,48%, dimana capaian ini lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 86%.

b) Kendala

Adapun kendala yang perlu diantisipasi dalam pencapaian target sasaran mutu dalam layanan pengujian dan kalibrasi, antara lain:

- Keterbatasan jumlah peralatan pengambilan contoh serta kalibrasi dapat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan sampling
- Waktu penyelesaian terhadap beberapa jenis sampel dengan karakteristik yang berbeda belum dipisahkan dengan jelas seperti sampel air dan aneka komoditi dengan rangkaian pengujian yang memiliki tahapan yang panjang
- Modernisasi peralatan laboratorium baik untuk peralatan pendukung proses maupun proses belum sepenuhnya dilakukan
- Terbatasnya sumber daya untuk melakukan pengujian dan kalibrasi parameter diluar lingkup yang sudah diuji

Sementara untuk kegiatan sertifikasi, bimbingan dan konsultasi belum ditemukan kendala terkait pelaksanaannya. Dalam pencapaian target ketepatan waktu sampel di kegiatan pengujian dan kalibrasi diperlukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis pengujian serta dilakukan pencegahan terhadap hal-hal yang menghambat pencapaian target penyelesaian..

c) Tindak Lanjut

Diperlukan Kerjasama dari semua pihak pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Diperlukan juga perencanaan dalam pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian, perencanaan penjadwalan sampling serta perencanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar.

Indikator Kinerja 2: Nilai Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Hingga akhir triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 72% dengan realisasi sebesar 72% Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan III melakukan survey NPS pada pelanggan yang menggunakan layanan jasa industri serta melakukan analisis hasil survey kepada responden yang memberi nilai survey. Pelaksanaan survey menggunakan google form dengan link https://bit.ly/SurveyNPS_BSPJISamarinda yang di share melalui media *WhatsApp* dan kemudian akan diisi oleh masing-masing pengguna jasa.

Berdasarkan hasil survei NPS sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025, telah diperoleh penilaian 36 (tiga puluh enam) responden dari jumlah total sebanyak 243 pengguna jasa. Dari data survei yang diterima, hasil rekapitulasi respon survey NPS sampai periode Triwulan III seperti tabel berikut:

Tabel 14. Hasil Survei NPS Triwulan III

No	Nilai / Score	Jumlah Responden
1	1 - 7	0
2	8	10
3	9	9
4	10	16
Total Responden		36
% Promoters (Promoters / total responden x 100)		69,44 %
% Detractors (Detractors /total responden x 100)		0 %
NPS = (% Promoters) – (% Detractors)		69,44

Berdasarkan tabel diatas berikut hasil perhitungan NPS :

Dari survei NPS diterima data 36 responden tanggapan. Dari tanggapan tersebut diperoleh nilai :

- 25 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (*Promoters*)
- 11 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (*Passives*)
- 0 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (*Detractors*)

Maka Nilai NPS yang diperoleh adalah:

$$\% \text{ Promoters: } (25/36) \times 100 = 69,44$$

$$\% \text{ Detractors: } (0/36) \times 100 = 0$$

$$\text{NPS} = 69,44 - 0 = 69,44$$

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh skor NPS periode Triwulan III adalah 69,44 dari target 6,00 dengan capaian 1157,33%, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.

b) Kendala

Pelaksanaan survey Net Promotore Score masih dilakukan secara manual menggunakan media WhatsApp sehingga responden memberikan jawaban secara sukarela, sehingga jumlah responden belum maksimal sesuai dengan jumlah pengguna jasa yang dilayani.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah responden yang mengikuti survei NPS masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah pengguna jasa. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah diharapkan pelaksanaan survei dapat dilakukan menggunakan sistem survei melalui aplikasi SILABISA.

SK 2 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri**Tabel 15. Capaian Kinerja SK 2**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9,22	-50,49	-547,62%	72	72	B7: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian PNBP di aplikasi SILABISA B8: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian PNBP di aplikasi SILABISA	B7: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order B8: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order B9:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								B9: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian PNBPN di aplikasi SILABISA	a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBPN c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order
		Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	4500	3903	85,87	75	80	B7: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA B8: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA B9:	B7: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media B8: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media B9: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	
		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,10	9,95	122,84%	70	70	B7: a) Penyampaian Lap. Wasdal Semester I b) Pengusulan PSP untuk pengadaan Semester 1 c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL d) Penyusunan Laporan BMN Semester 1 2025 B8: a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APIP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1 B9: a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APIP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1	B7: a) Telah disampaikan Laporan Wasdal Semester I Tahun 2025 milik BSPJI Samarinda kepada BSKJI. b) Telah disampaikan usulan PSP untuk pengadaan BMN Semester I Tahun 2025 milik BSPJI Samarinda kepada Biro Keuangan Kementerian Perindustrian. c) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Juni tahun 2025 kepada KPKNL. d) Telah disusunnya Laporan BMN Semester I Tahun 2025 Milik BSPJI Samarinda. B8: a) Telah dilaksanakan Reviu laporan BMN Semester I Tahun 2025 milik BSPJI Samarinda oleh Tim APIP Kementerian Perindustrian. b) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Juli tahun 2025 kepada KPKNL. c) Telah dilakukan finalisasi Laporan BMN Semester I Tahun 2025 Milik BSPJI Samarinda. B9: a) Telah dilaksanakan Reviu laporan BMN Semester I Tahun 2025 milik BSPJI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
									Samarinda oleh Tim APIP Kementerian Perindustrian. b) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Juli tahun 2025 kepada KPKNL. c) Telah dilakukan finalisasi Laporan BMN Semester I Tahun 2025 Milik BSPJI Samarinda.
		Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	41,50	39,05	94,10%	75	75	B7: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPU BLU pada minggu ke IV setiap bulannya B8: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPU BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPU BLU B9: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPU BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	B7: a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU ke PPK BLU pada tanggal 3 Juli 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPU BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 29 Juli 2025. c) Monitoring penagihan piutang B8: a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU ke PPK BLU pada tanggal 1 Agustus 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPU BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 27 Agustus 2025. c) Monitoring penagihan piutang B9: a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU ke PPK BLU pada tanggal 2 September 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPU BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 29 September 2025. c) Monitoring penagihan piutang

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini :

1) Indikator Kinerja 1 : Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 72% dengan realisasi 72%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan III adalah melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan terkait pekerjaan Jasa pendampingan / konsultasi penyusunan dokumen sistem keamanan pangan HACCP bagi IKM di kota Balikpapan dan Jasa Pendampingan / Konsultasi TKDN IK serta kontrak kerjasama dengan PT.Pupuk Kalimantan Timur terkait pekerjaan jasa pengujian emisi sumber tidak bergerak, udara ambien, dan udara lingkungan kerja tahun 2025/2026.

Berdasarkan data yang terdapat di sistem SILABISA, sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025 telah dibuat sebanyak 266 penawaran harga jasa kepada pelanggan yang mencakup keseluruhan layanan. Data pendapatan PNBP berdasarkan pembukuan bendahara penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Pendapatan PNBP berdasarkan Pembukuan Bendahara Penerimaan

No.	Layanan	sd. TW II	Jul	Agt	Sep	Total Realisasi TW III
A	424113 (Jasa Pelayanan)	1.830.703.594	848.203.100	656.751.100	524.591.550	3.861.885.344
1.	Pengujian	1.521.805.950	697.830.400	505.501.100	483.908.150	3.209.045.600
2.	Kalibrasi	27.815.444	2.130.000	950.000	6.605.000	37.500.444
3.	Sertifikasi Produk	49.500.000	10.050.000		3.800.000	63.350.000
4.	Pemeriksaan Halal	12.928.000	-	-	-	12.928.000
5.	Pelatihan	8.000.000	-	-	-	8.000.000
6.	Konsultasi	166.000.000	124.000.000	130.000.000	12.000.000	432.000.000
7.	Verifikasi TKDN	15.620.000		15.620.000		31.240.000
8.	Penggunaan SDM	4.234.000	3.400.000	3.420.000	-	11.054.000
9.	Penggunaan Aset	26.436.200	10.792.700	1.260.000	18.278.400	56.767.300
B	424911 (Jasa Perbankan)	19.940.859	2.542.901	2.287.362	8.982	24.780.104
	Jasa Giro	19.940.859	2.542.901	2.287.362	8.982	24.780.104
	Total Pendapatan	1.852.280.453	850.746.001	659.038.462	524.600.532	3.886.665.448

Pada Periode triwulan III, telah diperoleh PNBP sebesar Rp. 3.886.665.448,- berdasarkan pembukuan bendahara penerimaan. Adapun target indikator ini adalah persentase peningkatan

PNBP sebesar 9,22% (Rp. 7.850.336,162) dari capaian PNBP 2024 (Rp. 7.187.636.112). Berdasarkan capaian PNBP sampai Triwulan III maka diperoleh realisasi target persentase peningkatan PNBP sebesar -50,49% dengan capaian sebesar -547,62%.

b) Kendala

Adapun kendala yang dihadapi pada Triwulan III diantaranya:

- Distribusi pendapatan yang belum merata antar layanan. Kontribusi terbesar PNBP masih didominasi oleh jasa pengujian (sekitar 82,6% dari total pendapatan jasa), sementara layanan lain seperti kalibrasi, sertifikasi produk, pelatihan, pemeriksaan halal, dan pemanfaatan aset masih sangat rendah realisasinya. Ketergantungan yang tinggi pada satu jenis layanan (jasa pengujian) berpotensi menimbulkan risiko apabila terjadi penurunan permintaan.
- Berdasarkan data SILABISA, telah dibuat sebanyak 266 penawaran harga jasa kepada pelanggan sampai dengan akhir triwulan III. Namun, jumlah penawaran yang terealisasi menjadi order belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan PNBP.
- Penerimaan PNBP pada layanan utama selain jasa pengujian seperti kalibrasi, sertifikasi, pemeriksa halal pelatihan, verifikasi TKDN, masih menunjukkan kontribusi minim terhadap total pendapatan. Rendahnya capaian dari layanan ini menjadi salah satu faktor terhambatnya optimalisasi PNBP.

c) Tindak Lanjut

Adapun tindak lanjut di triwulan selanjutnya adalah:

- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pendapatan PNBP secara berkala setiap bulan untuk memastikan progres realisasi PNBP sesuai dengan target.
- Melakukan pendekatan lebih aktif kepada calon pelanggan potensial berdasarkan penawaran yang sudah diberikan agar dapat direalisasikan menjadi order serta melakukan evaluasi terhadap penawaran yang tidak menjadi order.
- Melakukan peningkatan promosi layanan Jasa Lainnya selain layanan jasa pengujian melalui kunjungan, audiensi serta promosi melalui sosial media.

2) Indikator Kinerja 2 : Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri.

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Jumlah hasil layanan yang dimaksud adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam satu tahun.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 80%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan III adalah pelaksanaan layanan jasa seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. Dalam rangka meningkatkan jumlah hasil layanan juga telah dilakukan analisis dan pengolahan data industri yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan industri yang ada di wilayah Kalimantan Timur seperti pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, perhotelan, dan rumah sakit. Selanjutnya, pada triwulan III telah dilakukan kunjungan dalam rangka peninjauan kerjasama pada PT. Indomining, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, PT. Dharma Sawit Nusantara selain itu juga telah dilakukan kunjungan lanjutan dalam rangka pendirian laboratorium satelit kerjasama dengan PT. FAP Agri.

Promosi sosial media telah dilakukan pada periode triwulan III tahun 2025 yaitu telah diproduksi dan dipublikasikan sebanyak 107 konten melalui akun media sosial resmi BSPJI Samarinda. Konten sebagai bahan promosi terdiri dari berbagai jenis, baik berupa gambar (poster, infografis, dokumentasi kegiatan) maupun video (video singkat, reels, maupun dokumentasi audiovisual lainnya).

Jumlah layanan jasa BSPJI Samarinda sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Layanan Periode Triwulan III Tahun 2025

Jenis Layanan	sd. TW II	Jul	Agt	Sep	Total Keseluruhan
Pengujian	2272	361	271	606	3510
Kalibrasi	46	17	236	0	299
Sertifikasi Produk	8	1	-	2	11
Pemeriksaan Halal	2	-	-	2	4
Pelatihan	24	28	10	0	62
Konsultasi	2	1	2	1	6
Verifikasi TKDN	2	-	4	-	6
Penggunaan SDM	3	1	1	-	5
Penggunaan Aset	-	-	-	-	0
Total Keseluruhan	2358	409	524	661	3903
% Capaian terhadap target					85,87%

Berdasarkan data pada tabel diatas, Jumlah Layanan pada periode Triwulan III tahun 2025 mencapai 3903 order dengan capaian sebesar 85,87% terhadap target 4.545 order.

b) Kendala

Adapun kendala yang dialami pada Triwulan III adalah:

- Penambahan lingkup layanan yang dibutuhkan pelanggan seperti layanan kalibrasi dan pengujian aneka komoditi belum bisa sepenuhnya dilakukan dikarenakan keterbatasan sumber daya.
- Sebaran industri di wilayah Kalimantan Timur yang sangat beragam pada sektor pertambangan, perkebunan, perhotelan, rumah sakit, dll, dimana belum sepenuhnya dapat dijangkau secara merata dan masih belum terfasilitasi dengan layanan BSPJI Samarinda serta keterbatasan waktu dan sumber daya manusia pada kegiatan kunjungan dan penjajakan kerjasama.
- Meskipun telah dilakukan promosi melalui 107 konten media sosial, ketercapaian layanan belum merata pada semua jenis jasa. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan promosi konten pada media sosial belum sepenuhnya efektif untuk menjangkau target sasaran industri secara lebih luas.

c) Tindak Lanjut

Adapun tindak lanjut pada triwulan selanjutnya adalah:

- Diperlukan kajian terhadap proses bisnis pada layanan pengujian dan kalibrasi terkait kebutuhan pengujian dan kalibrasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga dapat meningkatkan jumlah sampel. Selain itu, perlu untuk mempererat Kerjasama dengan pihak terkait pengelolaan lingkungan seperti DLH dan KLHK sehingga dapat diperoleh informasi terkait pengelolaan lingkungan dengan lebih mudah
- Melakukan monitoring secara berkala terkait konten promosi yang disiapkan pada sosial media.
- Melakukan optimalisasi promosi layanan dengan memperluas jangkauan promosi, baik secara daring melalui media sosial maupun luring melalui audiensi langsung dengan industri potensial. Serta mengatur efisiensi penggunaan SDM dan anggaran dengan melakukan perencanaan jadwal kunjungan secara lebih terintegrasi, misalnya dengan menggabungkan beberapa agenda promosi dalam satu perjalanan dinas.
- Rencana perbaikan ditriwulan selanjutnya adalah melakukan peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder dalam rangka pengembangan kapasitas dan kemampuan pelayanan jasa kepada pelanggan.

3) Indikator Kinerja 3 : Nilai *Revenue on Asset* (RoA)

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 70% dengan realisasi 70%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan III adalah :

- a. BSPJI Samarinda telah menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Semester I tahun 2025 kepada BSKJI sesuai nota dinas nomor 861/BSPJI-Samarinda/BMN/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025. Laporan tersebut disusun sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BSPJI Samarinda dalam transparansi, akuntabilitas, dan mendukung program pengawasan serta pengendalian kegiatan di lingkungan pelayanan BSPJI Samarinda.
- b. BSPJI Samarinda telah menyampaikan usulan Persetujuan Status Penggunaan (PSP) untuk BMN yang diadakan pada Semester I Tahun 2025 kepada Biro Keuangan Kementerian Perindustrian. Usulan ini disusun sebagai bagian dari tata Kelola aset yang tertib, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diharapkan seluruh aset yang diperoleh / diadakan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh BSPJI Samarinda dalam mendukung tugas pokok dan fungsi balai.
- c. Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari pemanfaatan BMN kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) disampaikan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini mencakup rincian pendapatan yang diperoleh dari berbagai bentuk pemanfaatan BMN, seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, maupun bentuk lainnya yang sah.
- d. BSPJI Samarinda juga telah melakukan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan BSPJI Samarinda selama periode semester pertama Tahun 2025 dengan telah disusun dan disampaikan Laporan BMN Semester I Tahun 2025. Laporan BMN milik BSPJI Samarinda juga telah direviu oleh Tim APIP Kementerian Perindustrian untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan serta memberikan masukan atas hal-hal yang memerlukan perbaikan atau penguatan dalam aspek penatausahaan, pelaporan dan pengamanan aset.

- e. Sepanjang Triwulan III Tahun 2025 BSPJI Samarinda juga telah melaksanakan Penatausahaan BMN berupa pemindahtanganan BMN. Proses pemindahtanganan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) melalui lelang merupakan salah satu mekanisme pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan cara dijual secara terbuka melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses Lelang dilakukan sebanyak 2 kali dengan pengajuan pertama berupa 1 paket barang inventaris dan peralatan kantor, dan pengajuan kedua berupa 3 unit kendaraan bermotor (Sepeda Motor).
- f. BSPJI Samarinda telah menyampaikan RKBMN Tahun 2027 kepada Biro Keuangan Kementerian Perindustrian pada Triwulan III Tahun 2025. RKBMN Tahun 2027 yang disusun oleh BSPJI Samarinda mencakup proyeksi kebutuhan barang dan peralatan pendukung yang dirancang untuk menunjang peningkatan kapasitas pelayanan teknis, pengembangan infrastruktur laboratorium, serta efisiensi operasional unit kerja. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara terencana dan berbasis kebutuhan riil, dengan mempertimbangkan kondisi existing aset, analisis beban kerja, serta rencana pengembangan program strategis ke depan.

Dari kegiatan yang telah dilakukan sepanjang Triwulan III, dilakukan perhitungan *Nilai Revenue on Asset (RoA)* dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Revenue on Asset (RoA)} &= (\text{PNBP Layanan Jasa} / \text{Total Nilai Aset}) \times 100\% \\ &= (3.886.665.448 / 39.072.070.308) \times 100\% = \mathbf{9,95\%}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai RoA pada Triwulan III sebesar 9,95% dari target 8,10% atau tercapai sebesar 122,84%.

b) Kendala

Tidak ditemukan kendala.

c) Tindak Lanjut

Dalam proses lelang BMN yang dilakukan :

- Untuk 1 paket barang inventaris dan peralatan kantor, proses lelang telah selesai dilakukan dan BSPJI Samarinda telah menyampaikan usulan penghapusan barang tersebut kepada Biro Keuangan Kementerian Perindustrian. Sampai laporan ini dibuat, BSPJI Samarinda sedang menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Penghapusan dari pejabat berwenang sebagai dasar untuk menghapus barang-barang tersebut dari daftar inventaris resmi.

- Sementara untuk 3 unit kendaraan bermotor, proses lelang telah selesai dilakukan dan saat ini BSPJI Samarinda sedang menunggu Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL Samarinda. Risalah Lelang tersebut diperlukan sebagai salah satu dokumen pendukung utama dalam pengusulan penghapusan BMN.

4) Indikator ke 4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 75 % dengan realisasi 75%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan III meliputi:

- Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU
- Pengajuan pengesahan penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU, dengan rincian:
 - Periode Juli diajukan pada tanggal 29 Juli 2025 melalui SP2D Nomor: 259993334500002, dengan Realisasi Penerimaan Rp. 514.088.804,- dan Realisasi Penggunaan/Belanja Rp. 655.215.814,-
 - Periode Agustus diajukan pada tanggal 27 Agustus 2025 melalui SP2D Nomor: 259993334500003, dengan Realisasi Penerimaan Rp. 614.952.536,- dan Realisasi Penggunaan/Belanja Rp. 1.000.275.315,-
 - Periode September diajukan pada tanggal 29 September 2025 melalui SP2D Nomor: 250460000000005, dengan Realisasi Penerimaan Rp. 453.614.898,- dan Realisasi Penggunaan/Belanja Rp. 705.210.155,-

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan, dengan perhitungan POBO sebagai berikut:

$$\text{POBO} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan BLU}}{\text{Belanja Operasional BLU \& RM (kecuali Belanja Modal)}} \times 100\%$$

$$\text{POBO} = \frac{3.886.665.448}{9.952.669.660} \times 100\%$$

$$\text{POBO} = 39,05\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai POBO pada Triwulan III sebesar 39,05% dari target 41,50% atau telah tercapai sebesar 94,10%.

b) Kendala

Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini.

c) Tindak Lanjut

Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja secara tepat waktu setiap bulannya.

SK 3 : Terwujudnya SDM Profesional

Tabel 18. Capaian Kinerja SK 3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
4	Terwujudnya SDM Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	82,96	83,18	100,27%	75	85	B7: a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Penetapan nilai sementara IP ASN Semester I B8: Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 1 B9: Pelaksanaan Pelatihan pengembangan kompetensi non teknis (In House Training)	B7: a) Update data pengembangan kompetensi pegawai dilakukan melalui Intranew pada Menu SiPegi bagian Update Data Diklat dengan menggunakan Akun Admin Kepegawaian. b) Pada tanggal 16 Juni 2025 telah disampaikan Rekapitulasi Nilai IP ASN dengan nilai 83,18. c) Pelaksanaan In House Training Pengambilan Contoh Partikulat Isokinetik secara SNI 17027:2021 pada tanggal 17-18 Juli 2025, yang diikuti oleh 12 orang peserta. B8: a) Pelaksanaan In House Training Pengoperasian dan Pengujian Parameter Kimia dengan HPLC pada tanggal 22 Agustus 2025, yang diikuti oleh 8 orang peserta. B9: a) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan In House Training yang telah dilaksanakan sampa dengan September 2025 b) Penyampaian Sertifikat In House Training kepada peserta c) Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti masing-masing pegawai

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indeks Profesionalitas ASN.

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 85%.

Pada triwulan III telah dilaksanakan pelatihan teknis melalui kegiatan *in house training* dan pelatihan eksternal yakni:

- In House Training Pengambilan Contoh Partikulat Isokinetik secara SNI 17027:2021 pada tanggal 17-18 Juli 2025, yang diikuti oleh 12 orang peserta.
- In House Training Pengoperasian dan Pengujian Parameter Kimia dengan HPLC pada tanggal 22 Agustus 2025, yang diikuti oleh 8 orang peserta.

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian nilai IP ASN pada triwulan III berjalan dengan baik, dimana sampai akhir triwulan III realisasi dari target antara telah tercapai. Adapun sampai Triwulan III telah dilaksanakan pelatihan internal (*in house training*) di BSPJI Samarinda sebanyak 12 (dua belas) kegiatan. Pada akhir triwulan III juga telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan *in house training* yang telah terselenggara sampai bulan September 2025.

Biro OSDM menyampaikan nilai IP ASN BSPJI Samarinda per tanggal 16 Juni 2025 pada Intranet dengan nilai:

- Kualifikasi : 22,74
- Kompetensi : 30,64
- Kinerja : 25,19
- Disiplin : 5,00
- Total : **83,18**

Berdasarkan nilai IP ASN tersebut, BSPJI Samarinda telah memenuhi target Perjanjian Kinerja sebesar 82,54 dengan capaian sebesar 100,27%.

b) Kendala

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dalam rangka pencapaian IP ASN dapat dilaksanakan dengan baik. Ketersediaan anggaran yang terbatas mengakibatkan perlu dilakukan seleksi terhadap pengajuan kegiatan pelatihan/ pengembangan kompetensi dengan mempertimbangkan urgensi dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

c) Tindak Lanjut

Dalam menindaklanjuti kondisi keterbatasan anggaran pada pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, maka setiap pegawai diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara online yang dapat diikuti secara gratis. Hal ini juga dapat menjadi solusi agar kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dapat lebih merata keseluruh pegawai. Pada triwulan selanjutnya masih terdapat beberapa rencana kegiatan pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan seperti kegiatan *team building* ataupun pelatihan internal bagi pegawai BSPJI Samarinda.

SK 4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 19. Capaian Kinerja SK 4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00			80	74	B7: Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA B8: Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA B9: Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA	B7: Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA B8: Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA B9: Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA
		Tingkat Penerapan SPBE	80,00	47,325	59,16%	70	70	B7: Membuat data dukung LKE SPBE B8: Membuat data dukung LKE SPBE B9: Membuat data dukung LKE SPBE	B7: a) Menerima surat tanggapan clearance atas revisi anggaran SPBE BSPJI Samarinda b) Rapat pembahasan indikator Tingkat penerapan SPBE B8:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
									Rapat Konsultasi Pembangunan SPBE B9: a) Reviu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, b) Reviu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, c) Reviu Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik, d) Reviu Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik.
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	4,70	104,21%	70	80	B7: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B8: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B9: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	B7: a) Pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pendingin ruangan. b) Penyajian informasi pelayanan publik yang update melalui website B8: a) Melakukan perbaikan saluran telepon layanan di ruang pelayanan publik b) Pelaksanaan reward kepada pegawai dengan predikat pegawai terinspirasi. c) Penyajian informasi pelayanan publik yang update pada media sosial resmi. B9: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana di unit pelayanan publik b) Koordinasi terkait penyediaan sistem informasi pelayanan publik yang update yang ramah kelompok rentan dan disabilitas. c) Melayani konsultasi dari RS. Dirgahayu Samarinda terkait pengisian suvey yang dilakukan Balai.

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 80% dengan realisasi 74%.

BSPJI Samarinda melaksanakan integrasi sistem SILABISA dengan aplikasi SIPPTBSKJI (<https://sipptbskji.kemenperin.go.id/nasional>) dalam rangka penyediaan data terbaru terkait layanan jasa industri. Data yang diintegrasikan meliputi jumlah order, jumlah sampel, nilai pendapatan PNBP/BLU dan jumlah pengguna jasa baik industri maupun non industri. Dengan terintegrasinya data tersebut, dashboard SIPPT BSKJI dapat menampilkan capaian UPT secara realtime.

Integrasi SILABISA dengan SIPPT pada tahun 2025 direncanakan mencakup 2 layanan yaitu layanan Pengujian dan layanan Kalibrasi. Hingga triwulan ke III progres kegiatan integrasi dilakukan berupa penyiapan database serta penguatan infrastruktur IT untuk kedua layanan tersebut.

Pada tahun 2025, BSPJI Samarinda memiliki 9 layanan jasa Industri dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20. Layanan Jasa BSPJI Samarinda

No	Jenis Layanan	Data Terintegrasi Sistem Informasi BSKJI	Ket.
1.	Pengujian	v	Dalam proses integrasi data
2.	Kalibrasi	v	Dalam proses integrasi data
3.	Sertifikasi Produk	x	
4.	Pemeriksaan Halal	x	
5.	Pelatihan	x	
6.	Konsultansi	x	
7.	Verifikasi TKDN	x	
8.	Narasumber /Pengajar	x	

Berdasarkan rencana tahapan integrasi SILABISA dan SIPPT BSKJI, proses integrasi saat ini mencapai 74%. Diharapkan pada akhir triwulan IV akan proses integrasi akan selesai 100%.

Tabel 21. Layanan Jasa BSPJI Samarinda

No.	Tahapan	Bobot	Progres	Capaian
1.	Analisis Kebutuhan dan Mapping Layanan	10%	100%	10%
2.	Desain Arsitektur Integrasi	25%	100%	25%
3.	Pendaftaran dan Autentikasi API	15%	100%	15%
4.	Pengembangan Modul API Client di SILABISA	30%	80%	24%
5.	Pengujian Integrasi	10%	0%	0%
6.	Implementasi dan Monitoring	10%	0%	0%
	Total			74%

Dalam rangka pemutakhiran informasi layanan selama proses integrasi belum selesai sehingga tidak memenuhi target fisik yang telah direncanakan diawal. Meskipun demikian, BSPJI Samarinda tetap melakukan pengiriman data secara periodik kepada BSKJI.

b) Kendala

- Integrasi data teknis cukup Kompleks sehingga butuh dilakukan penginputan dan penyesuaian data kembali pada sistem.
- Dibutuhkan adanya penyesuaian sumber daya tim pengembang dalam hal teknis laboratorium, khususnya kebutuhan teknis laboratorium dengan kemampuan teknis pemrograman.

c) Tindak Lanjut

Perlu dilakukan optimalisasi dua layanan yang terintegrasi dengan melakukan uji coba berkelanjutan terhadap layanan pengujian dan kalibrasi pada sistem integrasi untuk memastikan alur data berjalan konsisten dan dapat direplikasi pada layanan lainnya. Selanjutnya, perlu dilakukan monitoring dan koordinasi intensif dengan BSKJI terkait standar data dan prosedur integrasi agar tidak terjadi pengulangan proses.

2) Tingkat Penerapan SPBE

Penerapan (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE pada masing-masing Satuan Kerja.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 70% dengan realisasi 70%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan III adalah :

1. Menerima surat tanggapan clearance atas revisi anggaran SPBE BSPJI Samarinda (tgl 18 Juli 2025). Kegiatan ini dapat memenuhi data dukung Kertas Kerja SPBE 1.3
2. Mengikuti rapat pembahasan indikator tingkat penerapan SPBE (tgl 30 Juli 2025).
3. Mengikuti rapat konsultasi pembangunan SPBE (tgl 26 Agustus 2025). Kegiatan ini dapat memenuhi data dukung Kertas Kerja SPBE 1.6 dan 1.7 pada tahap identifikasi kebutuhan.

4. Melaksanakan Reviu Kebijakan dan Penerapan Arsitektur SPBE Kemenperin. Kegiatan ini dapat memenuhi data dukung Kertas Kerja SPBE 1.1.
5. Melaksanakan Reviu Kebijakan dan Penerapan Peta Rencana SPBE Kemenperin. Kegiatan ini dapat memenuhi data dukung Kertas Kerja SPBE 1.2.
6. Melaksanakan Reviu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (Intranet Kemenperin – Sistem Informasi Keuangan), Reviu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SP4N Lapor), Reviu Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik (Website Kemenperin – Data Industri SIIINas), Reviu Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik (Sektor Perpajakan - Coretax). Kegiatan ini dapat memenuhi data dukung Kertas Kerja SPBE 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4.

Berdasarkan *self assesmen* pemenuhan Kertas Kerja SPBE, sampai dengan triwulan III BSPJI Samarinda memperoleh nilai 47,325 sehingga tercapai 59,16% dari target 80. Seluruh dokumen pendukung diunggah pada aplikasi: <https://lemon.kemenperin.go.id/>.

Tabel 22. Kertas Kerja Perhitungan Indikator Kinerja

No.	Indikator	Bobot		Pemenuhan Data Dukung (Range 0 - 1)	Nilai
1	TATA KELOLA SPBE	100%	45%		17,325
	1 Reviu Arsitektur SPBE Kemenperin telah dilaksanakan	8%		1	8
	2 Reviu Peta Rencana SPBE Kemenperin telah dilaksanakan	8%		1	8
	3 Konsultasi Rencana dan Anggaran SPBE dengan Pusdatin telah dilakukan	15%		1	15
	4 Reviu Rencana dan Anggaran SPBE telah dilaksanakan	4%		1	4
	5 Reviu inovasi proses bisnis telah dilaksanakan	3%		0	0
	6 Proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada Pusdatin	15%		0,1	1,5
	7 Pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi	20%		0,1	2
	8 Reviu pembangunan aplikasi SPBE telah dilaksanakan	7%		0	0
	9 Reviu layanan Pusat Data Kemenperin dan Layanan Pusat Data Pemerintah	7%		0	0
	10 Reviu tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Kemenperin	7%		0	0
	11 Reviu pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan	6%		0	0
2	MANAJEMEN SPBE	100%	25%		0
	12 Reviu Manajemen Data SPBE telah dilaksanakan	20%		0	0
	13 Reviu Manajemen Keamanan Informasi SPBE telah dilaksanakan	20%		0	0
	14 Reviu Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan	10%		0	0
	15 Reviu Manajemen Aset TIK (SPBE) telah dilaksanakan	10%		0	0
	16 Reviu Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE telah dilaksanakan	10%		0	0
	17 Reviu Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan	5%		0	0
	18 Reviu Manajemen Perubahan SPBE telah dilaksanakan	10%		0	0
	19 Reviu Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan	15%		0	0
3	LAYANAN SPBE	100%	30%		30
	20 Reviu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	20%		1	20
	21 Reviu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	25%		1	25
	22 Reviu Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	25%		1	25
	23 Reviu Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik	30%		1	30
Nilai					43,725

b) Kendala

Kurangnya kemampuan SDM dalam memenuhi data dukung dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c) Tindak Lanjut

Koordinasi dengan Pusdatin Kemenperin untuk diberikan penjelasan lebih lanjut dalam rangka pemenuhan kertas kerja SPBE yang belum dapat dilaksanakan.

3) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 70 % dengan realisasi 80%

Hasil perhitungan indeks pelayanan publik sampai dengan Triwulan III tahun 2025 diperoleh dari penilaian indikator berdasarkan pedoman Permenpan No.5 tahun 2023 , sebagai berikut:

Tabel 23. Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	4,69	24%	1,13
2	Profesionalisme SDM	4,80	25%	1,20
3	Sarana dan Prasarana	5,00	18%	0,90
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	5,00	11%	0,55
5	Konsultasi dan Pengaduan	5,00	10%	0,50
6	Inovasi	3,50	12%	0,42
Nilai Indeks Pelayanan Publik				4,70

Berdasarkan hasil penilaian pada Triwulan III, nilai Indeks Pelayanan Publik yang telah dicapai adalah 4,70. Nilai ini telah memenuhi kriteria kategori “A” yang bermakna “Pelayanan Prima”. Nilai tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 4,51 dengan capaian sebesar 104,21%.

b) Kendala

Adapun kendala yang dialami pada Triwulan III, diantaranya:

- Berdasarkan hasil penilaian, aspek inovasi memperoleh nilai indeks terendah. pengembangan inovasi pelayanan sebagai salah satu aspek penilaian belum maksimal dan masih menjadi titik lemah yang perlu mendapat perhatian. Pada aspek inovasi, telah dilakukan dengan pembuatan sistem penawaran menggunakan aplikasi SILABISA, namun

inovasi tersebut belum diikutsertakan dalam kompetisi dan mendapatkan prestasi sesuai dengan persyaratan penilaian. Selain itu salah satu aspek penilaian dengan indikator sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik, belum memiliki SK sumber daya manusia dalam menginisiasi penciptaan inovasi sebagai sebagai salah satu aspek penilaian.

- Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana masih bersifat pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan, belum sampai pada peningkatan kualitas sarana/prasarana secara signifikan. Hal ini dapat berpotensi menghambat upaya peningkatan standar layanan dalam jangka panjang.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan dalam Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.

SK 5 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Tabel 24. Capaian Kinerja SK 5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50,00	100	200%	100	100	B7: Monitoring progress penyampaian tindak lanjut LHP Ke Sekretariat Inspektorat Jenderal B8: Reviu Tindak Lanjut LHP oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal B9: Kegiatan selesai	B7: Menindaklanjuti hasil tanggapan tindak lanjut penyelesaian audit kinerja dari Sekretariat Itjen tanggal 19 Juli 2025, dimana dari 7 item temuan ketidaksesuaian masih terdapat 4 item yang belum memenuhi rekomendasi B8: Penyampaian dokumen perbaikan tindak lanjut audit kinerja ke Sekretariat Itjen B9: Telah diterimanya surat penyelesaian semua tindak lanjut audit kinerja dari Sekretariat Itjen dengan Nomor : R/ 137/IJ-IND/PW/IX/2025 tanggal 09 September 2025
		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	94,98			80	80	B7: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI	B7: a) Pembuatan Arsip Inaktif sesuai dengan JRA b) Penyimpanan Arsip Aktif sesuai dengan aturan yang berlaku B8:

								b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Januari – Juni) B8: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyusun daftar arsip aktif B9: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melalui penarapan srikandi c) Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas arsip aktif	Pemberkasan Arsip Inaktif berdasarkan fungsi satker B9: Penyimpanan Arsip Inaktif di ruang <i>record</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Pelaksanaan audit kinerja oleh Tim Auditor Inspektorat III untuk kegiatan TA. 2024 dilakukan mulai tanggal 16 Januari s.d 31 Januari 2025. Pada awal Triwulan III telah dilakukan perbaikan dokumen tindak lanjut audit untuk beberapa item yang masih belum sesuai dengan rekomendasi yang disarankan yaitu:

- Analisis pemenuhan target kinerja layanan
- Laporan hasil pelaksanaan promosi
- Surat balasan dari BSKJI terkait strategi menghadapi kompetitor
- Bukti permohonan reuiu SOP

Selanjutnya, dokumen perbaikan tindak lanjut audit kinerja ini telah disampaikan ke Sekretariat Itjen pada tanggal 22 Agustus 2025 yang memuat tentang:

- Laporan analisis capaian kinerja layanan pengujian yang mengalami penurunan dengan membandingkan dari periode 2 tahun sebelumnya.
- Penambahan BAB Analiss Hasil Kegiatan pada laporan kegiatan promosi/ pemasaran dengan menambahkan dampak penambahan klien dari kegiatan tersebut.
- Lampiran surat balasan dari BSKJI terkait rekomendasi tindak lanjut strategi menghadapi adanya kompetitor layanan sejenis dengan Nomor Surat: B/3021/BSKJI.1/PR/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025.
- Bukti reviu SOP berupa form isian permohonan reviu SOP.

Pada akhir Triwulan III, telah diterima surat balasan atas penyampaian tindak lanjut hasil audit dari Sekretariat Itjen dengan Nomor: R/ 137/IJ-IND/PW/IX/2025 tanggal 09 September 2025 dengan *pernyataan "Adapun temuan hasil pemeriksaan tersebut sebanyak 7 (tujuh) temuan dan 17 (tujuh belas) saran pada Tahun Anggaran 2024, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan kami dapat menyatakan selesai sesuai dengan lingkup program dan keuangan yang telah diaudit"* Selanjutnya, adapun rekapitulasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal BSPJI Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tahun				
2015 – 2023 (C)		2024 (B)		
Saldo Temuan	% Penyelesaian Hasil Temuan	Hasil Temuan	Rekomendasi "SR"	% Penyelesaian Hasil Temuan
0	100%	7	7	100%

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi target dari indikator *"rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker"* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 A &= (B+C)/2 \\
 &= (100\% + 100\%)/2 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh realisasi rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker sebesar 100% dari target 50% dengan capaian 200%.

b) Kendala

Kendala yang dirasakan pada tanggapan dokumen tindak lanjut dari tim Sekretariat Itjen yang cukup lama sehingga melewati dari waktu penyelesaian yang ditargetkan.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah respon tanggapan dari tim Sekretariat Itjen cukup lama sehingga menghambat penyelesaian tindak lanjut audit kinerja. Untuk selanjutnya, perlu

dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan tim Sekretariat Itjen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil temuan yang melibatkan tim Auditor dalam proses penyelesaiannya. Dengan demikian, BSPJI Samarinda dapat memperoleh informasi terkait progres penilaian/pemeriksaan dari auditor dan dapat lebih cepat menindaklanjuti apabila terdapat dokumen penyelesaian tindak lanjut yang masih belum sesuai.

2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan) pada masing-masing Satuan Kerja.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 80% dengan realisasi 80%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pembuatan daftar arsip inaktif tidak melewati retensi arsip

Tabel 26. Daftar Arsip Inaktif

No	Kegiatan	Kode	Uraian Informasi Berkas	Retensi		Hasil Akhir
				Aktif	Inaktif	
1.	Arsip Inaktif TU	KU.03.01	Arsip Keuangan Tahun 2022	2 thn	9 thn	Dinilai Kembali
2.	Arsip Inaktif OPTI	IND.13	Arsip OPTIPK Tahun 2023	1 thn	4 thn	Permanen
3.	Arsip Inaktif SS	MS.05	Arsip SS Tahun 2019	5 thn	2 thn	Permanen
4.	Arsip Inaktif PJI	MS.08	Arsip PJI Tahun 2023	1 thn	2 thn	Musnah

2. Melaksanakan Penyimpanan arsip inaktif media kertas di dalam folder atau sampul
3. Memberkaskan arsip inaktif berdasarkan klasifikasi mewakili seluruh fungsi satker
4. Melaksanakan penyimpanan arsip inaktif di ruang record center

b) Kendala

Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

c) Tindak Lanjut

Monitoring berkala untuk kegiatan pada bulan berikutnya.

SK 6 : Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi

Tabel 27. Capaian Kinerja SK 6

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,45	85,40	106,09%	75	77,5	B7: Penyusunan Laporan PP 39 TW 2 b) Penyusunan Renstra 2025-2029 B8: Reviu APIP KAK RAB dan Data dukung TA. 2026 B9: a) Reviu DJA KAK RAB dan Data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 3 c) Pelaporan Monev BAPPENAS	B7: a) Penyusunan Laporan PP 39 TW 2 b) Rapat Monev TW 3 B8: a) Reviu APIP KAK RAB dan Data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 3 B9: Pelaporan Monev BAPPENAS
		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18	96,25	102,20%	72	72	B7: a) Pelaporan CAPUT Juni b) Revisi DIPA TW 3 Pemutakhiran RPD c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juli d) Pengajuan GUP Juli B8: a) Pelaporan CAPUT Juli b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Agustus c) Pengajuan GUP Agustus B9: a) Pelaporan CAPUT Agustus b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja September c) Pengajuan GUP September d) Monev Penyerapan Anggaran TW 3	B7: a) Pelaporan Caput Juni 2025 dilakukan pada tanggal 3 Juli 2025 b) Pengajuan Usulan Revisi Pemutakhiran Hal III dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025 dan disahkan melalui DIPA ke 12 tanggal 14 Juli 2025 c) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNPB BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 29 Juli 2025 B8: a) Pelaporan Caput Juli 2025 dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNPB BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 27 Agustus 2025 B9: a) Pelaporan Caput ke KPPN Bulan Agustus 2025 dilakukan pada tanggal 2 september 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNPB BLU pada Minggu ke IV yaitu pada dilakukan tanggal 29 September 2025 c) Monev Triwulan III pada tanggal 3 Oktober 2025

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 90%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan III adalah:

- Reviu APIP KAK RAB dan Data dukung TA. 2026 dilaksanakan tanggal 18 September 2025.
- Rapat Monev TW 3 dilaksanakan oleh Plt Kepala BSPJI Samarinda dengan Ketua Tim Kerja dan pegawai.
- Pelaporan Monev BAPPENAS

Berdasarkan kegiatan tersebut, rencana aksi dan target fisik telah berhasil dilaksanakan meskipun rencana reviu KAK RAB dan Data dukung TA. 2026 oleh DJA belum terlaksana karena proses reviu masih pada tahap internal Kemenperin.

Selain pelaksanaan kegiatan yang mendukung akuntabilitas kinerja, dilakukan pula upaya persiapan penilaian SAKIP di tahun 2026 melalui self asesmen pemenuhan LKE AKIP dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 28. Self Asesmen penilaian SAKIP

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
1	Perencanaan Kinerja	1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.	SOP Penyusunan Renstra, Renkin, Perjakin, TPNBP, RKAKL
			2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.	Penyusunan konsep Renstra 2025-2029
			3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	Rencana Kinerja 2025, Rencana Kerja 2025
			4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	Perjanjian Kinerja 2025
			5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	Rencana Aksi 2025

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
			6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	Penyusunan KAK RAB TA.2026
			7. Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	Draft Renstra, Renkin, Perjakin, TPNBP
		2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	Seluruh dokumen perencanaan telah ditandatangani pimpinan dan diberi stempel
			2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan di website
			3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	Konsep Renstra dan Perjanjian Kinerja 2025
			4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	Konsep Renstra dan Perjanjian Kinerja 2025
			5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra BSKJI
			6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 (satu) periode Perencanaan Strategis).	Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra BSKJI
			7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	Target kinerja ditetapkan sesuai dengan histori pencapaian periode sebelumnya
			8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	Cascading SKP dari Perjanjian Kinerja Kepala Balai dalam bentuk Matrik Peran Hasil
			9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan <i>Crosscutting</i>).	Matrik Crosscutting
			10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	Penyusunan SKP seluruh pegawai
		3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk	1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	KAK dan RAB, serta Matrik Keterkaitan kinerja dan anggaran

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
		mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	Rencana Aksi 2025
			3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .	Perjanjian Kinerja 2025
			4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	Pengukuran Rencana Aksi per bulan, Pelaporan Rencana Aksi per triwulan
			5. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	Revisi SOP, Reviu Renstra, Revisi DIPA.
			6. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik.	Revisi SOP, Reviu Renstra, Revisi DIPA.
			7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	Rapat Kick Off dan Rapat Kerja
			8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	SKP Seluruh pegawai, Rapat Kick Off yang dihadiri seluruh pegawai
2.	Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan.	1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	SOP Pengumpulan Data Kinerja
			2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	Pedoman Kinerja di dalam Renstra
			3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	SOP Pengumpulan Data Kinerja
		2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara fektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja dan Rapat Kick Off
			2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Pengukuran kinerja TW 1 melalui SILABISA
			3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	Pengukuran kinerja TW 1 melalui SILABISA
			4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	Pengukuran kinerja TW 1 melalui SILABISA
			5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas	SKP Per Triwulan, Laporan PP 39 per Triwulan

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
			pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	
			6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Pedoman Pengukuran Kinerja SILABISA
			7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Pedoman Pengukuran Kinerja SILABISA
		3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	1. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja/ penghasilan.	Rekap Belanja Pegawai
			2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	Pengukuran Kinerja sampai dengan TW3
			3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) Organisasi.	Pengukuran Kinerja sampai dengan TW3
			4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja
			5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja
			6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja
			7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	Nota Dinas Penyampaian efisiensi anggaran
			8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Nota Dinas Penyampaian efisiensi anggaran
			9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja
			10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Bahan Rapat Rapat Kick Off di sampaikan kepada seluruh pegawai melalui WA Grup.
3.	Pelaporan Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	Laporan Trwiulan (PP 39)
			2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	Laporan Trwiulan (PP 39)
			3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	Laporan Trwiulan (PP 39) dengan Surat Pengantar

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
			4. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	Laporan Trwiulan (PP 39) dengan Surat Pengantar disampaikan tepat waktu
		2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.	1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
		3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
			4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
			7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Akan ditindaklanjuti TW4 (LAKIP)
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Evaluasi.	1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal.	Keputusan Menteri Perindustrian No. 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
			2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja.	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
			3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
		2. Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.	1. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
			2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	Pemenuhan dokumen untuk evaluasi AKIP ditugaskan kepada bagian Program di Sub bagian Tata Usaha
			3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
			4. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja.	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
			5. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
		3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti.	Sedang dilakukan tindaklanjut
			2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal.	Sedang dilakukan tindaklanjut
			3. Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk	Perbaikan sementara dilakukan berdasarkan masukan tim penilai saat penilaian SAKIP.

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
			perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	
			4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Sedang dilakukan tindaklanjut
			5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil Evaluasi AKIP internal.	Sedang dilakukan tindaklanjut

Berdasarkan hasil *self assessmen* penilaian SAKIP, terdapat 62 dari 80 kriteria dokumen maupun kegiatan yang telah ditindaklanjuti dalam rangka pemenuhan penilaian SAKIP berdasarkan LKE AKIP.

b) Kendala

Dalam pemenuhan dokumen untuk penilaian SAKIP telah diupayakan dengan maksimal.

c) Tindak Lanjut

Pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 yang belum terlaksana diantaranya :

- Pelaksanaan rapat evaluasi kinerja berkala yang membahas rekomendasi atas perbaikan kinerja serta rencana penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran dalam mencapai target kinerja agar dapat ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya dan tetap didokumentasikan dengan memadai;
- Perlu dilakukan kaji ulang terhadap kriteria dan mekanisme penerapan SK reward dan punishment atas kinerja, dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pegawai.
- Terkait penerapan budaya kinerja agar dapat terus dikembangkan dengan meningkatkan dukungan kompetensi sumber daya balai, pemanfaatan pendekatan teknologi terkini untuk meningkatkan citra layanan balai serta penetapan kebijakan dari pimpinan untuk mendorong perubahan kinerja organisasi yang diinternalisasi kepada seluruh pegawai.

2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 72% dengan realisasi 72%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan III meliputi pelaksanaan revisi DIPA Triwulan III, pengesahan penerimaan dan belanja, penyusunan RPD, pelaporan CAPUT, pengajuan GUP, dan Monev Penyerapan Anggaran Triwulan III. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, diperoleh Nilai IKPA pada Triwulan II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Rekapitulasi IKPA Triwulan III

Bulan	Ket.	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM	Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Juli	Nilai	100,00	82,86	87.07	100,00	100,00	0,00	100,00	67,43	70%	0,00	96,33
	Nilai Akhir	10,00	12,43	0,00	10,00	10,00	0,00	25,00				
Agst	Nilai	100,00	82,84	90.48	100,00	100,00	0,00	100,00	67,43	70%	0,00	96,32
	Nilai Akhir	10,00	12,43	0,00	10,00	10,00	0,00	25,00				
Sept	Nilai	100,00	80.44	90.74	100,00	100,00	0,00	100,00	67,38	70%	0,00	96,25
	Nilai Akhir	10,00	12,07	0,00	10,00	10,00	0,00	25,00				

Dari tabel diatas, diperoleh capaian nilai IKPA Triwulan I sebesar 96,25 dari target sebesar 94,18 dengan capaian 102,20%.

b) Kendala

Pada Triwulan III, pelaksanaan anggaran juga belum dapat berjalan maksimal dikarenakan penerimaan PNPB yang belum sesuai dengan target sehingga mempengaruhi realisasi belanja pada masing-masing kegiatan. Kondisi ini juga mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran sepanjang triwulan ini sehingga berdampak pada pencapaian aspek “Deviasi Hal. III DIPA” dan “Penyerapan Anggaran”.

c) Tindak Lanjut

Pada Triwulan selanjutnya, perlu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran agar sebisa mungkin dapat mengikuti perencanaan (RPD) sehingga dapat mempertahankan nilai “Deviasi Hal. III DIPA” yang tidak terlalu besar deviasinya. Selain itu, aspek “Penyerapan Anggaran” juga perlu diperhatikan agar dapat lebih dimaksimalkan melalui penggunaan saldo BLU sambil menunggu penerimaan PNPB setiap periodenya.

SK 7 : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

Tabel 30.Capaian Kinerja SK 7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	80,00	85,39	106,74%	75	75	B7: a) Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium b) Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan II 2024 B8: Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa B9: Proses Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium	B7: a) Pengadaan Bahan Kimia b) Belanja Bahan Penolong c) Belanja Alat Pelindung Diri d) Pengadaan Isokinetic Method 5 dengan Penunjang Sampling Set Environmental Supply Company (ESC) B8: a) Pengadaan Density Determinations Kits b) Pengadaan Bahan Kimia B9: a) Pengadaan Bahan Kimia IV- IDEXX REAGENT/ CONSUMABLES E.Coli & Coliform dan IDEXX QUANTI-TRAY Cat. No. WQT-2K b) Pengadaan Glassware

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA. 2025 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 80%

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II adalah Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dan Belanja Jasa Lainnya.

Persentase penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan akun belanja berikut:

1. Kode Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
2. Kode Akun 521211 Belanja Bahan
3. Kode Akun 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
4. Kode Akun 522191 Belanja Jasa Lainnya

Dari akun tersebut sampai triwulan II telah terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi P3DN Akun Terpilih

No	Akun	Pagu	Realisasi P3DN (Rp)	Impor (Rp)	Total Realisasi	% RP3DN
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7 = (4/3x100%)
1	521811	40.790.000	17.603.650	-	17.603.650	43,16%
2	521211	6.000.000	-	-	-	0,00%
3	521111	195.000.000	171.000.000	-	171.000.000	87,69%
4	522191	122.160.000	122.160.000	-	122.160.000	100,00%
	Total	363.950.000	310.763.650	-	310.763.650	85,39%

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh capaian Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri sampai Triwulan III sebesar 85,39% dari target 80% dengan capaian 106,74%.

b) Kendala

Tidak ada kendala.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa adalah melakukan peninjauan terhadap tingkat pencapaian penggunaan produk dalam negeri, mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses pengadaan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program P3DN ke depan, termasuk optimalisasi pemanfaatan e-Katalog, peningkatan kapasitas penyedia lokal, dan penyusunan strategi pengadaan yang mendukung peningkatan nilai TKDN secara berkelanjutan.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan penyedia produk dalam negeri untuk memastikan ketersediaan barang/jasa yang memiliki nilai TKDN, memperkuat pemahaman dan komitmen seluruh pegawai terkait pentingnya penggunaan produk dalam negeri melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, mengoptimalkan pemanfaatan e-Katalog dan sistem informasi TKDN dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, serta memperbaiki proses monitoring dan evaluasi agar pelaporan penggunaan produk dalam negeri lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Monitoring Rincian Output Bulanan

Kegiatan pada Triwulan III TA 2025 terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan I Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

RO	Pagu	Pagu Efektif	% Real. Keu. s/d Sept	TVRO	RVRO	Prog	sd. TW 2		Juli		Agustus		September	
							RVRO	Prog	RVRO	Prog	RVRO	Prog	RVRO	Prog
AEC Kerja Sama														
Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899	126,754	76.86%	5	4	88.0%	4	62.0%	0	8%	0	9%	0	9%
AEF Sosialisasi dan Diseminasi														
Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	629,133	251,340	37.32%	500	408	84.0%	272	48.0%	45	8%	46	19%	45	9%
BAD Pelayanan Publik kepada Industri														
Jasa pelayanan teknis pengujian	1,537,492	1,537,492	67.66%	300	281	86.7%	237	46.8%	40	30.5%	4	8.40%	0	1.0%
Jasa pelayanan teknis kalibrasi	149,532	149,532	10.54%	29	11	73.55%	5	44.5%	1	10%	3	9.05%	2	10%
Jasa pelayanan teknis sertifikasi	481,955	392,393	42.54%	44	15	70.5%	8	40.0%	3	10%	3	10.5%	1	10%
Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	184,472	184,472	40.34%	13	11	85.0%	5	31.0%	2	25%	2	14%	2	15%
BDI Fasilitas dan Pembinaan Industri														
Pemanfaatan Teknologi Industri	320,522	320,522	50.62%	10	9	90.1%	9	24.1%	0	60%	0	2.0%	0	4.0%
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan														
Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan	2,007,500	1,341,592	47.38%	59	29	74.5%	18	52.0%	10	5%	1	12.5%	0	5%
Total EC	5.465.505	4.304.097	53.12%											

1) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 5 (lima) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

a. AEC. Kerja sama

Pada Triwulan III, realisasi kegiatan kerjasama dilaksanakan melalui perjalanan dinas dalam rangka peninjauan kerja sama dengan industri ataupun perusahaan yang akan melakukan kerja sama dengan BSPJI Samarinda.

b. AEF. Sosialisasi dan Diseminasi

Pada KRO ini terdiri dari sub komponen Temu Pelanggan, Pameran, Webinar, Promosi dan Pemasaran Layanan, serta Unit Pelayanan Publik. Dalam rangka efisiensi belanja, pagu belanja dalam KRO ini sebagian besar diblokir dan menyisakan pagu hanya untuk mendukung kegiatan Promosi dan Pemasaran Layanan serta Unit Pelayanan Publik. Pada Triwulan III, realiasi kegiatan dilaksanakan melalui belanja barang yang berupa pencetakan *bookled* dan pembuatan *souvenir* yang diperlukan dalam pelaksanaan promosi dan pemasaran layanan ke industri/perusahaan yang berpotensi menjadi pengguna jasa layanan BSPJI Samarinda. Selain itu, juga terdapat realisasi terhadap kebutuhan terkait *Sosial Media Management*.

c. BAD. Pelayanan Publik kepada industri

Pada KRO ini terdiri dari Rincian Output yang mendukung pelaksanaan layanan jasa teknis yakni Layanan Pengujian, Layanan Kalibrasi, Layanan Sertifikasi, serta Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri. Adapun realiasi pada KRO ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan layanan-layanan jasa serta diperoleh melalui pelaksanaan uji profisiensi serta pengembangan kelembagaan sepanjang triwulan ini.

d. BDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri

Pada Triwulan III, realisasi kegiatan pada KRO ini dilaksanakan melalui pelaksanaan layanan Konsultasi dan Pembinaan Industri.

e. CAH. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Pada KRO Sarana Bidang Industri dan Perdagangan selama triwulan ini direalisasikan melalui pembelian alat laboratorium yakni *Horiba 2000 Series NO3 2000-S Benchtop Ion Selective Electro Chemistry Analyzer 1 Channel Ready to Meas for Nitrate & Therm* dan *Isokinetic Method 5 dengan Penunjang Sampling Set Environmental Supply Company (ESC)*.

2) Kendala

Pada triwulan ini, adapun target yang ditetapkan oleh BSKJI adalah realisasi keuangan sebesar 72,30% dan capaian realiasasi keuangan hanya sebesar 53,12%. Berdasarkan capaian BSPJI Samarinda di triwulan III ini, hanya KRO Kerja sama yang memenuhi target realisasi keuangan, sementara KRO lainnya belum memenuhi target. Kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini adalah selain karena kondisi lambatnya progres penerimaan PNBP juga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama triwulan III. Kondisi ini paling berdampak pada pengadaan alat laboratorium yang sampai akhir triwulan belum maksimal direalisasikan, sementara kebutuhan akan alat ini cukup mendesak mengingat adanya pengembangan ruang lingkup serta kebutuhan akan peningkatan pada layanan pengujian yang merupakan layanan dengan proporsi jumlah penerimaan terbesar diantara layanan-layanan yang ada di BSPJI Samarinda. Selain itu, pada KRO Sosialisasi dan

Diseminasi Layanan Jasa Teknis juga mengalami penundaan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan-kegiatan Temu Pelanggan, *Focus Group Discussion*, dan Pameran yang selama ini menjadi forum untuk berinteraksi dengan pelanggan tidak dapat dilaksanakan.

3) Rekomendasi

Dalam menindaklanjuti kondisi efisiensi belanja, BSPJI Samarinda telah menyusun skala prioritas kegiatan berdasarkan urgensi dan dampaknya, sehingga kegiatan yang paling krusial seperti layanan jasa tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran. Dalam menanggapi kondisi penerimaan PNPB yang belum sesuai dengan target, BSPJI Samarinda sebagai satuan kerja BLU, telah menggunakan Saldo BLU untuk menutupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sepanjang triwulan ini. Sepanjang Triwulan III tetap diupayakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak diblokir sehingga pencapaian realisasi fisik tetap berjalan sambil menunggu proses penerimaan PNPB.

b. Kegiatan II Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

RO	Pagu	Pagu Efektif	% Real. Keu. s/d Sept.	TVRO	RVRO	Prog.	sd. TW 2		Juli		Agustus		September	
							RVRO	Prog	RVRO	Prog	RVRO	Prog	RVRO	Prog
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000	150,000	1.70%	1	0	76.0%	0	50.0%	0	9%	0	8.0%	0	9.0%
Layanan Perkantoran	12,626,995	11,978,668	78.36%	1	0	79.0%	0	50.0%	0	10%	0	10.0%	0	9%
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
Layanan Sarana Internal	621,000	238,374	58.07%	37	16	77.0%	12	57.0%	3	9%	1	4%	0	7%
EBC Layanan Manajemen SDM Internal														
Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806	371,686	40.71%	52	49	85.0%	44	50.0%	6	20%	-1	10%	0	5%
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370	-	0.00%	1	0	73.5%	0	48.0%	0	8%	0	8.50%	0	9%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,110	-	0.00%	1	0	73.5%	0	48.0%	0	8%	0	8.50%	0	9%
Layanan Manajemen Keuangan	75,500	-	0.00%	2	1	88.0%	1	48.0%	0	20%	0	12%	0	8%
Layanan Reformasi Kinerja	24,800	24,800	25.00%	1	0	79.0%	0	39.0%	0	10%	0	20%	0	10%
Layanan Penyelenggara -an Kearsipan	1,400	1,400	0.00%	1	0	75.5%	0	50.0%	0	8%	0	9.5%	0	8%
Total WA	14.190.981	12.764.928	75.87%											

1) Hasil yang dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

a. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Pada KRO ini terdiri dari RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi serta RO Layanan Perkantoran. Pada Triwulan III, pada RO Layanan Hubungan Masyarakat sudah terdapat realisasi melalui pembelian barang persediaan dan belanja ekstrakomptabel. Sementara pada RO Layanan Perkantoran telah menunjukkan realisasi yang baik. Adapun Layanan Perkantoran meliputi pelaksanaan pembayaran gaji serta pemenuhan kebutuhan operasional balai, yang sepanjang Triwulan III telah berjalan dengan baik dan sesuai jadwal rutin sehingga tidak mengganggu operasional sehari-hari.

b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal selama triwulan ini sudah menunjukkan adanya realisasi, meskipun pada KRO ini jumlah anggaran yang diblokir cukup besar. Realisasi dari KRO ini meliputi pengadaan alat pengolah data seperti *Personal Computer* serta peralatan perkantoran dan mebelair.

c. Layanan Manajemen SDM Internal

Realisasi Layanan Manajemen SDM Internal diperoleh melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dan *In House Training* yang dilaksanakan sepanjang triwulan ini. Adapun blokir Kegiatan Peningkatan Potensi SDM telah dibuka sebagian, namun dana tersebut direvisi untuk menambah kebutuhan belanja di kegiatan Peningkatan Kompetensi dan *In House Training*.

d. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal terdiri dari RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Reformasi Kinerja, dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Adapun RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Manajemen Keuangan seluruh pagu belanjanya diblokir. Selanjutnya, untuk RO Layanan Reformasi Kinerja, pada triwulan III sudah menunjukkan adanya realisasi sementara pada Layanan Penyelenggaraan Kearsipan belum menunjukkan adanya realisasi.

2) Kendala

Pada triwulan ini, realisasi keuangan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri mencapai 75,87% dan capaian ini telah memenuhi target keuangan dari BSPJI sebesar 72,30%. RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Sarana Internal, serta Layanan Pendidikan dan Pelatihan belum menunjukkan capaian realisasi

keuangan yang sesuai dengan target BSKJI. Sementara pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal secara umum tidak dapat terealisasi akibat hampir seluruh anggaran diblokir. Kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini secara garis besar sama seperti pada kegiatan sebelumnya, yakni terkait adanya efisiensi belanja serta lambatnya progres penerimaan PNBP. Namun, dikarenakan kegiatan yang ada merupakan kegiatan rutin yang memang harus direalisasikan seperti pembayaran gaji dan honor, pembayaran langganan daya dan jasa, serta pemenuhan kebutuhan operasional balai, maka realisasi keuangan pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri lebih baik daripada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri.

3) Rekomendasi

Rencana perbaikan di periode selanjutnya adalah mengupayakan pelaksanaan kegiatan yang sempat tertunda di triwulan III serta melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan per triwulannya. Selanjutnya juga diperlukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk mendorong capaian triwulan berikutnya.

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Hambatan dan kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Perjanjian Kinerja diantaranya adalah:

- Pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* dan *Nilai Net Promoter Score (NPS)* terdapat kendala dimana pelaksanaan survei pada beberapa layanan jasa masih menggunakan metode konvensional sehingga tingkat partisipasi responden belum mencakup semua pengguna jasa.
- Pada indikator *Jumlah Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri*, *Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*, dan *Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri* ditemukan kendala dimana terdapat beberapa layanan seperti pemeriksaan halal, pelatihan, konsultasi, verifikasi TKDN, dan layanan penggunaan aset yang permintaannya masih sangat sedikit. Selain itu, pada layanan jasa konsultasi, pendampingan, pembimbingan dan verifikasi masih didominasi oleh industri kecil yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah. Selanjutnya, strategi penambahan pelanggan baru melalui rencana penambahan lingkup layanan yang dibutuhkan pelanggan seperti layanan kalibrasi dan pengujian aneka komoditi belum bisa sepenuhnya dilakukan dikarenakan keterbatasan sumber daya terutama peralatan pendukung.

- Pada indikator *Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)* ditemukan beberapa kendala pada layanan pengujian dan kalibrasi seperti keterbatasan jumlah peralatan *sampling* dan laboratorium, serta adanya perbedaan tahapan pengujian berdasarkan karakteristik sampel.
- Pada indikator *Indeks Profesionalitas ASN* kendala yang dihadapi adalah ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga mengakibatkan perlu dilakukan seleksi terhadap pengajuan kegiatan pelatihan/ pengembangan kompetensi.
- Pada indikator *Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI* ditemukan kendala dimana integrasi data teknis cukup Kompleks sehingga butuh dilakukan penginputan dan penyesuaian data kembali pada sistem.
- Pada indikator *Tingkat Penerapan SPBE* kendala yang terjadi lebih kepada kurangnya pemahaman sumber daya tim teknis dalam memenuhi data dukung dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pada indikator *Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* terdapat kendala dimana pelaksanaan anggaran juga belum dapat berjalan maksimal dikarenakan penerimaan PNPB yang belum sesuai dengan target sehingga mempengaruhi realisasi belanja pada masing-masing kegiatan.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Hambatan dan Kendala pada Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan III 2025 secara garis besar terkait dengan penerimaan PNPB yang belum sesuai dengan target yang diharapkan. Sepanjang triwulan III telah dilakukan layanan jasa seperti *sampling*, namun untuk pembayaran tidak langsung dilakukan sehingga penerimaan PNPB menjadi piutang yang tidak dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Selain itu, proses pengembangan layanan dan penambahan ruang lingkup juga membutuhkan proses yang lebih lama sehingga layanan baru yang diharapkan dapat mendorong penerimaan PNPB, tidak dapat memberikan kontribusi sampai dengan triwulan ini.

3.3. Langkah Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Langkah dan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Perjanjian Kinerja diantaranya adalah:

- Pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* dan *Nilai Net Promoter Score (NPS)* diupayakan untuk pengembangan survei terhadap seluruh jenis pelayanan melalui sistem informasi serta dilakukan sosialisasi pentingnya survei kepuasan masyarakat melalui

sosial media, serta himbauan langsung kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan jumlah responden. Selain itu, juga dilakukan pendekatan secara langsung kepada responden yang memberikan nilai terendah untuk mendapatkan informasi terkait kendala yang dihadapi.

- Pada indikator *Jumlah Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri, Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri* akan dilakukan promosi (*bundling service*) dan koordinasi di beberapa industri/pelaku usaha dan Dinas Kota/Kabupaten terkait layanan yang potensial untuk digunakan industri/pelaku usaha dengan memanfaatkan media digital, booklet layanan, dan testimoni pengguna jasa untuk meningkatkan *awareness* pelanggan, serta peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan *stakeholder* terkait.
- Pada indikator *Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)* diperlukan perencanaan dalam proses pengujian, pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian, perencanaan penjadwalan sampling serta perencanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar.
- Pada indikator *Indeks Profesionalitas ASN* untuk menindaklanjuti kondisi keterbatasan anggaran pada pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, maka setiap pegawai diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara online yang dapat diikuti secara gratis.
- Pada indikator *Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI* Perlu dilakukan optimalisasi dua layanan yang terintegrasi dengan melakukan uji coba berkelanjutan terhadap layanan pengujian dan kalibrasi pada sistem integrasi untuk memastikan alur data berjalan konsisten dan dapat direplikasi pada layanan lainnya
- Pada indikator *Tingkat Penerapan SPBE* akan dilakukan koordinasi dengan Pusdatin Kemenperin untuk diberikan penjelasan lebih lanjut dalam rangka pemenuhan kertas kerja SPBE yang belum dapat dilaksanakan
- Pada indikator *Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* perlu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran agar sebisa mungkin dapat mengikuti perencanaan (RPD) sehingga dapat mempertahankan nilai “Deviasi Hal. III DIPA” yang tidak terlalu besar deviasinya.

3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah mengupayakan perencanaan yang matang serta strategis di awal triwulan serta melakukan monitoring yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan pada setiap triwulan. Selanjutnya, terkait dengan penerimaan PNBK yang belum sesuai dengan target, pada triwulan selanjutnya akan tetap dilakukan kegiatan promosi melalui *direct marketing* ke perusahaan-perusahaan serta mengikuti lelang/tender pengujian lingkungan. Selain itu, akan dirumuskan strategi penawaran harga berupa diskon 15-20% untuk menarik pelanggan. Kemudian, akan dilakukan penugasan kepada personel khusus agar fokus untuk melakukan penagihan piutang ke perusahaan yang telah dilayani.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Realisasi Kegiatan

Capaian Kinerja triwulan III menunjukkan progres realisasi fisik dari pemenuhan target Perjakin mencapai 77,76%. Selain itu, persentase realisasi keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI berbasis akrual terhadap pagu efektif sebesar 47,43%, sementara realisasi keuangan berdasarkan Sistem Informasi Keuangan Intranew berbasis akrual terhadap pagu efektif sebesar 70,13%, sementara persentase realisasi keuangan berdasarkan Ompan terhadap pagu total sebesar 56,76%. Adapun capaian realisasi fisik tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan BSKJI yakni sebesar 75,00%, sementara untuk capaian realisasi keuangan belum sesuai dengan target yang ditetapkan BSKJI yakni sebesar 72,30%.

Selama periode Triwulan III ini, untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui efisiensi anggaran, juga telah dilakukan telah dilakukan 1 kali revisi DIPA kewenangan DJA, 1 kali revisi DIPA kewenangan Kanwil, dan 3 kali revisi DIPA kewenangan KPA. Selanjutnya, sampai akhir triwulan ini dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang ada, terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja yang telah mendapatkan hasil capaian dengan rata-rata capaian sebesar 119,23%, yakni:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri
3. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)
4. Nilai Net Promoter Score (NPS)
5. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6. Jumlah hasil layanan jasa industri
7. Nilai Revenue on Asset (RoA)
8. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)
9. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
10. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
11. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
12. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker
13. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
14. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
15. Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktifitas Industri

Pelaksanaan Kinerja per Kegiatan pada triwulan ini, masih terdapat beberapa KRO belum mencapai target realisasi fisik maupun keuangan yang ditetapkan oleh BSKJI. Pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri realisasi keuangan masih mencapai nilai 53,12% dan pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri telah melebihi target yakni sebesar 75,87% (Aplikasi SAKTI berbasis AkruaI terhadap Pagu Efektif).

4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Adapun kendala utama yang menghambat pelaksanaan kinerja keuangan maupun fisik sampai triwulan ini adalah belum tercapainya target penerimaan PNBp, dimana capaian penerimaan PNBp masih sebesar Rp. 3,886,665,448 dari target penerimaan pada DIPa yang senilai Rp. 9,359,130,000. Hal ini mempengaruhi realisasi belanja pada kegiatan-kegiatan yang memiliki sumber dana dari PNBp/BLU. Selain itu, kondisi sumber penerimaan yang masih didominasi oleh Layanan Pengujian, sementara Layanan Pendampingan/Pelatihan, Sertifikasi Produk, dan Pemeriksaan Halal belum memberikan kontribusi yang baik bagi capaian Penerimaan PNBp BSPJI Samarinda.

4.3. Saran dan Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah perlu dilakukan optimalisasi aktifitas yang mendukung pencapaian target keuangan dan layanan jasa yang sebelumnya tertunda dan tidak tercapai. Selain itu, terkait dengan penerimaan PNBp perlu diupayakan penagihan terhadap pekerjaan kontraktual yang telah selesai dikerjakan agar dapat dibayarkan sebelum tahun 2025 berakhir sehingga PNBp yang diperoleh dapat digunakan untuk mengejar target realisasi keuangan. Kemudian, pada Layanan Pelatihan yang dianggap potensial untuk mendatangkan pelanggan dan PNBp, direncanakan untuk mengadakan kegiatan pelatihan (ISO 9001:2015, Pengujian Mikrobiologi, K3, atau pelatihan dengan tema lainnya) secara rutin sepanjang triwulan berikutnya. Selanjutnya, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik antar tim kerja untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pencapaiannya membutuhkan peran dari masing-masing tim kerja.

Demikian laporan triwulan III tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda. Semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi Badan standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, maupun pihak terkait.

LAMPIRAN

REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN III TA. 2025
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,66	Indeks	3,86	105,46%	72%	72%	B7	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B7	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b)Pemantauan pengaduan pelanggan	- Pelaksanaan survei yang masih menggunakan metode konvensional pada beberapa layanan jasa - Adanya keterbatasan petugas dalam memonitoring pengguna jasa yang sudah maupun yang belum mengisi survei - Kurangnya pengetahuan responden akan pentingnya dilakukan survei kepuasan masyarakat - Beberapa responden memberikan penilaian survei kurang baik karena hasil uji sample pada layanan pengujian tidak sesuai harapan pengguna jasa.	- Evaluasi Responden dengan Nilai di Bawah Target - Perbaikan pada Unsur dengan Nilai Terendah - Pendekatan kepada Responden dengan Nilai Terendah - Pengembangan Sistem Survei pada SIL - Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Responden	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan IV
										B8	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B8	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b)Pemantauan pengaduan pelanggan				
										B9	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B9	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b)Pemantauan pengaduan pelanggan c) Melakukan analisis hasil survey kepuasan pelanggan kepada responden yang memberi nilai di bawah 3,6				
			TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang	210	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	246	117,14%	75%	85%	B7	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan	B7	a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultansi industri. b) Pengajuan peningkatan	- Adanya penghematan anggaran pemerintah khususnya pada Dinas	- Pelaksanaan promosi dan koordinasi di beberapa industri/pelaku usaha dan Dinas Kota/Kabupaten terkait	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
							% Fisik		Kegiatan					
							Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			memanfaatkan layanan jasa industri*						pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi	kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga	Kota/Kabupaten - Waktu penyelesaiannya proses sertifikasi produk terkendala dengan proses verifikasi yang memerlukan waktu yang cukup lama di SIINas. - Penambahan lingkup layanan belum bisa sepenuhnya dilakukan dikarenakan keterbatasan sumber daya terutama peralatan pendukung. - Layanan lain (kalibrasi, sertifikasi produk, pelatihan, konsultasi, dll.) belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna jasa - Hasil dari upaya pengembangan seperti pembuatan sistem penawaran harga melalui aplikasi SILABISA dan update booklet belum terlihat signifikan pada layanan selain pengujian	layanan yang potensial untuk digunakan industri/pelaku - Koordinasi dengan P4SI Kemeperin dan memantau proses sertifikasi melalui SIINas secara rutin. - Melakukan kajian terhadap lingkup layanan yang akan dikembangkan dengan menyesuaikan sumber daya yang ada. - Melakukan diversifikasi layanan dengan melakukan sosialisasi dan promosi khusus untuk layanan non-pengujian serta membuat paket layanan terpadu (bundling service) agar industri terdorong memanfaatkan lebih dari satu jenis layanan. - Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur peningkatan pemanfaatan layanan non-pengujian serta menggunakan hasil survei kepuasan pelanggan sebagai dasar perbaikan kualitas dan penyusunan strategi promosi	Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	
									B8 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk	B8 a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan peningkatan kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											program promosi penawaran harga				
										B9 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk	B9 a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan peningkatan kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga				
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	SK.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86,00	Persen	97,28	113,12%	75%	75%	B7 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B7 Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa, melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi	- Keterbatasan jumlah peralatan pengambilan contoh serta kalibrasi dapat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan sampling - Waktu penyelesaian terhadap beberapa jenis sampel dengan karakteristik yang berbeda belum	Diperlukan Kerjasama dari semua pihak pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Diperlukan juga perencanaan dalam pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian,perencanaan penjadwalan sampling serta perencanaan	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	Triwulan IV

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
									B8	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B8	Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa, melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi	dipisahkan dengan jelas seperti sampel air dan aneka komoditi dengan rangkaian pengujian yang memiliki tahapan yang panjang - Modernisasi peralatan laboratorium baik untuk peralatan pendukung proses maupun proses belum sepenuhnya dilakukan - Terbatasnya sumber daya untuk melakukan pengujian dan kalibrasi parameter diluar lingkup yang sudah diuji	kalibrasi dan pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar	
									B9	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B9	Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa, melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi			
									B7	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	B7	a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survey Net Promoter Score (NPS)			
									B8	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun	B8	a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan			
		SK.1.2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	6,00	Nilai	69,44	1157,33%	72%	72%		Pelaksanaan survey Net Promotore Score masih dilakukan secara manual menggunakan media WhatsApp sehingga responden memberikan jawaban secara sukarela, sehingga jumlah	Pelaksanaan survei dapat dilakukan menggunakan sistem survei melalui aplikasi SILABISA	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan IV	

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
											promosi layanan melalui media sosial		melalui media sosial b) Melakukan Survey Net Promoter Score (NPS)	responden belum maksimal sesuai dengan jumlah pengguna jasa yang dilayani			
										B9	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	B9	a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survey Net Promoter Score (NPS)				
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	SK.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9,22	Persen	-50,49	-547,62%	72%	72%	B7	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	B7	a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order	- Distribusi pendapatan yang belum merata antar layanan - Jumlah penawaran yang terealisasi menjadi order belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan PNBP - Penerimaan PNBP pada layanan utama selain jasa pengujian seperti kalibrasi, sertifikasi, pemeriksa halal pelatihan, verifikasi TKDN, masih menunjukkan kontribusi minim terhadap total pendapatan	- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pendapatan PNBP secara berkala setiap bulan untuk memastikan progres realisasi PNBP sesuai dengan target. - Melakukan pendekatan lebih aaktif kepada calon pelanggan potensial berdasarkan penawaran yang sudah diberikan agar dapat direalisasikan menjadi order serta melakukan evaluasi terhadap penawaran yang tidak menjadi order. - Melakukan peningkatan promosi layanan Jasa Lainnya selain layanan jasa pengujian melalui kunjungan, audiensi serta promosi melalui sosial media	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	Triwulan IV
										B8	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan	B8	a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											</				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										B8 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	B8 a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media	keterbatasan waktu dan sumber daya manusia pada kegiatan kunjungan dan penjajakan kerjasama - Ketercapaian layanan belum merata pada semua jenis jasa	promosi layanan dengan memperluas jangkauan promosi, baik secara daring melalui media sosial maupun luring melalui audiensi langsung dengan industri potensial - Melakukan peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder dalam rangka pengembangan kapasitas dan kemampuan pelayanan jasa kepada pelanggan		
										B9 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	B9 a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media				
		SK.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	8,10	Persen	9,95	122,84%	70%	70%	B7 a) Penyampaian Lap. Wasdal Semester I b) Pengusulan PSP untuk pengadaan Semester 1 c) Penyampaian laporan pemanfaatan	B7 a) Telah disampaikan Laporan Wasdal Semester I Tahun 2025 milik BSPJI Samarinda kepada BSKJI. b) Telah disampaikan usulan PSP untuk pengadaan BMN Semester I Tahun 2025 milik	Tidak ada kendala	- BSPJI Samarinda sedang menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Penghapusan dari pejabat berwenang sebaqaai dasar untuk	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										asset ke KPKNL d) Penyusunan Laporan BMN Semester 1 2025	BSPJI Samarinda kepada Biro Keuangan Kementerian Perindustrian. c) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Juni tahun 2025 kepada KPKNL. d) Telah disusunnya Laporan BMN Semester I Tahun 2025 Milik BSPJI Samarinda.		menghapus barang-barang yang telah dilelang dari daftar inventaris resmi - Untuk 3 unit kendaraan bermotor, proses lelang telah selesai dilakukan dan saat ini BSPJI Samarinda sedang menunggu Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL Samarinda		
									B8	a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APIP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1	B8 a) Telah dilaksanakan Reviu laporan BMN Semester I Tahun 2025 milik BSPJI Samarinda oleh Tim APIP Kementerian Perindustrian. b) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Juli tahun 2025 kepada KPKNL. c) Telah dilakukan finalisasi Laporan BMN Semester I Tahun 2025 Milik BSPJI Samarinda.				
									B9	a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APIP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1	B9 a) Telah dilaksanakan Reviu laporan BMN Semester I Tahun 2025 milik BSPJI Samarinda oleh Tim APIP Kementerian Perindustrian. b) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Juli tahun 2025 kepada KPKNL. c) Telah dilakukan finalisasi Laporan BMN Semester I Tahun 2025 Milik BSPJI Samarinda.				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	41,50	Persen	39,05	94,10%	75%	75%	B7 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPU BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	B7 a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU ke PPK BLU pada tanggal 3 Juli 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPU BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 29 Juli 2025. c) Monitoring penagihan piutang	Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini	Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja secara tepat waktu setiap bulannya	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV
										B8 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPU BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPU BLU	B8 a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU ke PPK BLU pada tanggal 1 Agustus 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPU BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 27 Agustus 2025. c) Monitoring penagihan piutang				
										B9 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPU BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	B9 a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU ke PPK BLU pada tanggal 2 September 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPU BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 29 September 2025. c) Monitoring penagihan piutang				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	82,96	Indeks	83,18	100,27%	75%	85%	B7 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Penetapan nilai sementara IP ASN Semester I	B7 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai dilakukan melalui Intranew pada Menu SiPegi bagian Update Data Diklat dengan menggunakan Akun Admin Kepegawaian. b) Pada tanggal 16 Juni 2025 telah disampaikan Rekapitulasi Nilai IP ASN dengan nilai 83,18. c) Pelaksanaan In House Training Pengambilan Contoh Partikulat Isokinetik secara SNI 17027:2021 pada tanggal 17-18 Juli 2025, yang diikuti oleh 12 orang peserta.	Ketersediaan anggaran yang terbatas mengakibatkan perlu dilakukan seleksi terhadap pengajuan kegiatan pelatihan/ pengembangan kompetensi dengan mempertimbangkan urgensi dari pelaksanaan kegiatan tersebut.	Setiap pegawai diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara online yang dapat diikuti secara gratis. Pada triwulan selanjutnya masih terdapat beberapa rencana kegiatan pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan seperti kegiatan team building ataupun pelatihan internal bagi pegawai BSPJI Samarinda	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV
								B8 Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 1	B8 a) Pelaksanaan In House Training Pengoperasian dan Pengujian Parameter Kimia dengan HPLC pada tanggal 22 Agustus 2025, yang diikuti oleh 8 orang peserta.						
								B9 Pelaksanaan Pelatihan pengembangan kompetensi non teknis (In House Training)	B9 a) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan In House Training yang telah dilaksanakan sampa dengan September 2025 b) Penyampaian Sertifikat In House Training kepada peserta c) Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti masing-masing pegawa						
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan	SK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi	20,00	Persen	0,00	0,00%	80%	74%	B7 Membuat perencanaan pengembangan aplikasi SILABISA	B7 Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA	Proses integrasi data pada aplikasi SIPPTBSKJI masih bergantung pada	- Perlu dilakukan optimalisasi dua layanan yang terintegrasi dengan melakukan uji coba	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan IV

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
	pelayanan publik		dengan sistem informasi BSKJI							B8	Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA	B8	Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA	jasa pihak ketiga dan infrastruktur IT belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan kendala teknis, keterlambatan, serta keterbatasan fleksibilitas dalam pengembangan dan pengelolaan sistem	berkelanjutan terhadap layanan pengujian dan kalibrasi pada sistem integrasi untuk memastikan alur data berjalan konsisten dan dapat direplikasi pada layanan lainnya. - Melakukan monitoring dan koordinasi intensif dengan BSKJI terkait standar data dan prosedur integrasi agar tidak terjadi pengulangan proses,		
										B9	Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA	B9	Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA				
		SK.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80,00	Persen	47,325	59,16%	70%	70%	B7	Membuat data dukung LKE SPBE	B7	a) Menerima surat tanggapan clearance atas revisi anggaran SPBE BSPJI Samarinda b) Rapat pembahasan indikator Tingkat penerapan SPBE	Kurang kemampuan SDM dalam memenuhi data dukung dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
										B8	Membuat data dukung LKE SPBE	B8	Rapat Konsultasi Pembangunan SPBE				
										B9	Membuat data dukung LKE SPBE	B9	a) Reviu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, b) Reviu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, c) Reviu Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik, d) Reviu Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik.				
		SK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	Indeks	4,7	104,21%	70%	80%	B7	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment	B7	a) Pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pendingin ruangan. b) Penyajian informasi	- Pengembangan inovasi pelayanan sebagai salah satu aspek penilaian belum maksimal dan			

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	pelayanan publik yang update melalui website	masih menjadi titik lemah yang perlu mendapat perhatian - Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana masih bersifat pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan, belum sampai pada peningkatan kualitas sarana/prasarana secara signifikan	Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik		
									B8 a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	B8 a) Melakukan perbaikan saluran telepon layanan di ruang pelayanan publik b) Pelaksanaan reward kepada pegawai dengan predikat pegawai terinspirasi. c) Penyajian informasi pelayanan publik yang update pada media sosial resmi.					
									B9 a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	B9 a) Pemeliharaan sarana dan prasarana di unit pelayanan publik b) Koordinasi terkait penyediaan sistem informasi pelayanan publik yang update yang ramah kelompok rentan dan disabilitas. c) Melayani konsultasi dari RS. Dirgahayu Samarinda terkait pengisian suvey yang dilakukan Balai.					
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50,00	Persen	100	200,00%	100%	100%	B7 Monitoring progress penyampaian tindak lanjut LHP Ke Sekretariat Inspektorat Jenderal	B7 Menindaklanjuti hasil tanggapan tindak lanjut penyelesaian audit kinerja dari Sekretariat Itjen tanggal 19 Juli 2025, dimana dari 7 item temuan ketidaksesuaian masih terdapat 4 item yang belum memenuhi rekomendasi	Kendala yang dirasakan pada tanggapan dokumen tindak lanjut dari tim Sekretariat Itjen yang cukup lama sehingga melewati dari waktu penyelesaian yang ditargetkan	Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan tim Sekretariat Itjen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil temuan	Subbag Tata Usaha	-

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
										B8	Reviu Tindak Lanjut LHP oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	B8	Penyampaian dokumen perbaikan tindak lanjut audit kinerja ke Sekretariat Itjen				
										B9	Kegiatan selesai	B9	Telah diterimanya surat penyelesaian semua tindak lanjut audit kinerja dari Sekretariat Itjen dengan Nomor : R/ 137/IJ-IND/PW/IX/2025 tanggal 09 September 2025				
		SK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	95,00	Nilai		0,00%	80%	80%	B7	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Januari – Juni)	B7	a) Pembuatan Arsip Inaktif sesuai dengan JRA b) Penyimpanan Arsip Aktif sesuai dengan aturan yang berlaku	Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya	Monitoring berkala untuk kegiatan pada bulan berikutnya	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV
										B8	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyusun daftar arsip aktif	B8	Pemberkasan Arsip Inaktif berdasarkan fungsi satker				
										B9	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penarapan srikandi c) Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas arsip aktif	B9	Penyimpanan Arsip Inaktif di ruang record				
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas	80,50	Nilai	85,40	106,09%	75%	80,0%	B7	Penyusunan Laporan PP 39 TW 2	B7	a) Penyusunan Laporan PP 39 TW 2 b) Rapat Monev TW 3	Dalam pemenuhan dokumen untuk penilaian SAKIP telah	- Pelaksanaan rapat evaluasi kinerja agar dapat ditingkatkan	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
			Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker							B8	Reviu APIP KAK RAB dan Data dukung TA. 2026	B8	a) Reviu APIP KAK RAB dan Data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 3	diupayakan dengan maksimal	frekuensi pelaksanaannya dan tetap didokumentasikan dengan memadai - Perlu dilakukan kaji ulang terhadap kriteria dan mekanisme penerapan SK reward dan punishment atas kinerja, dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pegawai - Terkait penerapan budaya kinerja agar dapat terus dikembangkan		
		SK.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18	Nilai	96,25	102,20%	72%	72%	B7	a) Pelaporan CAPUT Juni b) Revisi DIPA TW 3 Pemutakhiran RPD (maks 10 Juli) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juli d) Pengajuan GUP Juli	B7	a) Pelaporan Caput Juni 2025 dilakukan pada tanggal 3 Juli 2025 b) Pengajuan Usulan Revisi Pemutakhiran Hal III dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025 dan disahkan melalui DIPA ke 12 tanggal 14 Juli 2025 c) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNPB BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 29 Juli 2025	Pelaksanaan anggaran juga belum dapat berjalan maksimal dikarenakan penerimaan PNPB yang belum sesuai dengan target sehingga mempengaruhi realisasi belanja serta berdampak pada pencapaian aspek "Deviasi Hal. III DIPA" dan "Penyerapan Anggaran".	Dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran agar sebisa mungkin dapat mengikuti perencanaan (RPD) sehingga dapat mempertahankan nilai "Deviasi Hal. III DIPA" yang tidak terlalu besar deviasinya. Selain itu, aspek "Penyerapan Anggaran" juga perlu diperhatikan agar dapat lebih dimaksimalkan melalui penggunaan saldo BLU sambil menunggu penerimaan PNPB setiap periodenya	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV
										B8	a) Pelaporan CAPUT Juli b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Agustus c) Pengajuan GUP Agustus	B8	a) Pelaporan Caput Juli 2025 dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNPB BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 27 Agustus 2025				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										B9 a) Pelaporan CAPUT Agustus b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja September c) Pengajuan GUP September d) Monev Penyerapan Anggaran TW 3	B9 a) Pelaporan Caput ke KPPN Bulan Agustus 2025 dilakukan pada tanggal 2 september 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBK BLU pada Minggu ke IV yaitu pada dilakukan tanggal 29 September 2025 c) Monev Triwulan III pada tanggal 3 Oktober 2025				
8	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.7.1	Meningkatnya penggunaan produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	80,00	Persen	85,39	106,74%	75%	80%	B7 a) Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium b) Penyampaian laporan revidi pengadaan barang/ jasa Triwulan II 2024	B7 a) Pengadaan Bahan Kimia b) Belanja Bahan Penolong c) Belanja Alat Pelindung Diri d) Pengadaan Isokinetic Method 5 dengan Penunjang Sampling Set Environmental Supply Company (ESC)	Tidak ada kendala	Meningkatkan koordinasi dengan penyedia produk dalam negeri untuk memastikan ketersediaan barang/jasa yang memiliki nilai TKDN, memperkuat pemahaman dan komitmen seluruh pegawai terkait pentingnya penggunaan produk dalam negeri, mengoptimalkan pemanfaatan e-Katalog dan sistem informasi TKDN dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, serta memperbaiki proses monitoring dan evaluasi.	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV
Rata-rata							119,23%	75%	77,76%						

TABEL MONITORING RINCIAN OUTPUT JANUARI-SEPTEMBER 2025
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Sep	TVRO	RVRO	Progres	sd. TW 2		Juli		Agustus		September	
											RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
1	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan	AEC Kerja sama	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899	126,754	76.86%	5	4	88.00%	4	62.00%	0	8%	0	9%	0	9%
2		Penyelenggaraan Jasa Industri	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	629,133	251,340	37.32%	500	408	84.00%	272	48.00%	45	8%	46	19%	45	9%
3			BAD Pelayanan Publik kepada industri	Jasa pelayanan teknis pengujian	1,537,492	1,537,492	67.66%	300	281	86.70%	237	46.80%	40	30.5%	4	8.40%	0	1.0%
4				Jasa pelayanan teknis kalibrasi	149,532	149,532	10.54%	29	11	73.55%	5	44.50%	1	10%	3	9.05%	2	10%
5				Jasa pelayanan teknis sertifikasi	481,955	392,393	42.54%	44	15	70.50%	8	40.00%	3	10%	3	10.5%	1	10%
6				Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	184,472	184,472	40.34%	13	11	85.00%	5	31.00%	2	25%	2	14%	2	15%
7			BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Pemanfaatan Teknologi Industri	320,522	320,522	50.62%	10	9	90.10%	9	24.10%	0	60%	0	2.00%	0	4.00%
8			CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan	2,007,500	1,341,592	47.38%	59	29	74.50%	18	52.00%	10	5%	1	12.5%	0	5%
			Total EC		5,465,505	4,304,097	53.12%											
9	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000	150,000	1.70%	1	0	76.00%	0	50.00%	0	9%	0	8.00%	0	9.00%
10				Layanan Perkantoran	12,626,995	11,978,668	78.36%	1	0	79.00%	0	50.00%	0	10%	0	10.00%	0	9%
11			EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	621,000	238,374	58.07%	37	16	77.00%	12	57.00%	3	9%	1	4%	0	7%

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Sep	TVRO	RVRO	Progres	sd. TW 2		Juli		Agustus		September	
											RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
12			EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806	371,686	40.71%	52	49	85.00%	44	50.00%	6	20%	-1	10%	0	5%
13			EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370	-	0.00%	1	0	73.50%	0	48.00%	0	8%	0	8.50%	0	9%
14				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,110	-	0.00%	1	0	73.50%	0	48.00%	0	8%	0	8.50%	0	9%
15				Layanan Manajemen Keuangan	75,500	-	0.00%	2	1	88.00%	1	48.00%	0	20%	0	12%	0	8%
16				Layanan Reformasi Kinerja	24,800	24,800	25.00%	1	0	79.00%	0	39.00%	0	10%	0	20%	0	10%
17				Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,400	1,400	0.00%	1	0	75.50%	0	50.00%	0	8%	0	9.5%	0	8%
Total WA					14,190,981	12,764,928	75.87%											
Total					19,656,486	17,069,025	70.13%											